

LAPORAN HASIL PENELITIAN

IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP

POTENSI TINGKAT KRIMINALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



Diajukan Oleh:

Rini Apriyani, S.H.,M.H

Nur Aripkah, S.H.,M.H

Ismianingsih

Dea Nanda Selvia Isran

Andika Iqbal Inanda Rizal

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

**IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP
TINGKAT POTENSI KRIMINALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN
TIMUR**

Peneliti

**Rini Apriyani, S.H., M.H
Nur Aripkah, S.H., M.H
Dea Nada Selvia Isran
Ismianingsih
Andika Iqbal Inanda Rizal**

Laporan ini telah disahkan di Samarinda pada tanggal 5 Desember 2022

MENGESAHKAN,
DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dr.Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H
NIP. 19820307 200312 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Rini Apriyani, S.H., M.H

Nur Aripkah, S.H., M.H

Dea Nada Selvia Isran

Ismianingsih

Andika Iqbal Inanda Rizal

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul **IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP TINGKAT POTENSI KRIMINALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR** adalah hasil karya penulis dan dalam laporan penelitian ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya orang lain yang saya salin/tiru kecuali saya sebutkan sumbernya. Bila kemudian terbukti bahwa kami melakukan perbuatan menyalin atau meniru karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan saya akui sebagai karya sendiri maka, kami bersedia menerima sanksi.

Samarinda, 5 Desember 2022

Penulis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur".

Penulis menyadari laporan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar bisa menyempurnakan laporan penelitian ini yang nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan bagi pihak yang ingin menambah wawasan di bidang hukum pidana dan juga berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur.

Akhir kata semoga segala bantuan yang diberikan sampai dengan jadinya laporan penelitian ini mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya saran dan kritik yang membangun akan Penulis sangat terima.

Samarinda, 5 Desember 2022

Penulis

BIODATA



Rini Apriyani, S.H.,M.H. penulis kelahiran di Tenggarong Kalimantan Timur pada 06 April tahun 1980 adalah Dosen Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak tahun 2005.

Muslimah yang mengambil kekhususan di Hukum Islam dan Minat Studi Hukum Pidana ini menyelesaikan pendidikan formal Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin dan dilanjutkan dengan menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Brawijaya. Beberapa mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Hukum Pidana.



Nur Aripkah, S.H.,M.H. penulis dilahirkan di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Juni tahun 1997. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Mulawarman Fakultas Hukum

pada tahun 2019 dan dilanjutkan dengan melanjutkan Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dengan konsentrasi pembaharuan hukum pidana dan lulus pada tahun 2021. Dan mulai bergabung di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai Dosen sejak tahun 2022. Adapun Matakuliah yang penulis

ampu saat ini adalah Hukum Pidana Anak serta Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana. (Email:)



Ismianingsih, Penulis Lahir di Samarinda 13 Oktober 1999, Saat ini sedang menempuh Pendidikan Strata (S1) Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan minat studi Hukum Pidana.

Penulis pernah tergabung dalam organisasi Klinik Etik dan Hukum pada tahun 2019-2020 dan menjadi fasilitator Klinik Etik dan Advokasi Hukum pada tahun 2021 serta menjadi panitia di beberapa acara seminar nasional dan Internasional seperti Islamic Conference On Islamic Law In Indonesia (ICILI) pada tahun 2018.



Dea Nanda Selvia Isran, penulis Lahir di Samarinda 02 Desember 1999, saat ini menempuh Pendidikan Strata (S1) Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan minat studi Hukum

Pidana. Penulis pernah tergabung dalam organisasi Klinik Etik dan Hukum pada tahun 2019-2020 dan menjadi fasilitator Klinik Etik dan Advokasi Hukum pada tahun 2021 serta menjadi panitia di beberapa acara seminar nasional dan Internasional seperti Islamic Conference On Islamic Law In Indonesia (ICILI) pada tahun 2018.



Andika Iqbal Inanda Rizal, Penulis Lahir di Samarinda pada tanggal 30 Mei 1999, saat ini menempuh Pendidikan Strata (S1) Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan minat studi Hukum Pidana. Penulis pernah menjadi panitia seminar/webinar Konsentrasi Hukum Pidana serta tergabung dalam organisasi Lembaga Dakwa Fakultas (LDF) Al-mizan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PENELITIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
BIODATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kerangka Pemikiran	3
1. Flowchart Penelitian	3
2. Kerangka Konseptual	6
3. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Masalah	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Sumber dan Jenis Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10

5. Teknik Analisis Data	11
6. Lokasi	12
G. Sistematika Penulisan	13
H. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum IKN	15
B. Pengertian Tindak Pidana	18
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap potensi tingkat kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur	38
1. Tindak Pidana (Kriminalitas) dalam Kurung Waktu 2017-2021 di Kalimantan Timur	38
2. Potensi Tingkat Kriminalitas Terhadap Adanya Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur	206
B. Kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi potensi berkembangnya kriminalitas di wilayah Ibu Kota Negara (IKN)	213
1. Kesiapan Kepolisian	215
2. Kesiapan Kejaksaan	217
3. Kesiapan Pengadilan	217
BAB IV PENUTUP	219
A. Kesimpulan	219

B. Saran	220
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN	224

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu Kota Negara secara resmi akan berpindah ke Kalimantan Timur, hal demikian ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pemindahan ibu kota ini, diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan ke wilayah bagian Indonesia timur, sehingga nantinya diharapkan tidak ada lagi anggapan bahwa pembangunan Indonesia bersifat *Java Centris*, melainkan menjadi *Indonesia Centris*.

Pemindahan ibu kota suatu negara, tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Pemindahan ibu kota ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal demikian dikarenakan pemindahan ibu kota ini tentu berdampak dalam segala hal termasuk perubahan nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh kegiatan komersial terhadap perkembangan di daerah perkotaan tentu dapat mengakibatkan perilaku-perilaku negatif di masyarakat atau dengan kata lain dapat menimbulkan sisi lain perilaku masyarakat yang merasakan kesenjangan sosial. Hal demikian dikarenakan bangunan komersial yang merupakan symbol pembangunan modern dengan konsep global tanpa melihat kondisi masyarakat secara umum dapat menimbulkan implikasi terhadap gejala kriminalitas yang terjadi di lingkungan perkotaan.

Munculnya gejala kriminalitas akibat pemindahan ibu kota tentu tidak dapat ditampikan, mengingat kriminalitas memang merupakan masalah yang umum dan dimanapun, terlebih jika daerah tersebut termasuk kota metropolitan, seperti halnya pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, tentu juga akan memunculkan implikasi-implikasi salah satunya terhadap potensi kriminalitas yang mengancam di tengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap potensi tingkat kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur?
2. Bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi potensi berkembangnya kriminalitas di wilayah Ibu Kota Negara (IKN)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal:

Pertama, untuk mengetahui implikasi pemindahan ibu kota negara terhadap potensi tingkat kriminalitas. Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk menelusuri terkait dengan dampak pemindahan ibu kota negara (IKN) terhadap muncul berbagai potensi kriminalitas.

Kedua, untuk mengetahui kesiapan para aparat penegak hukum dalam rangka menghadapi potensi kriminalitas di ibu kota negara (IKN). Pada bagian ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui kesiapan dari aparat penegak hukum terhadap ancaman-ancaman kriminalitas, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pembangunan ibu kota negara (IKN).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait penyusunan suatu penelitian.

2. Manfaat Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama guna pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Flowchart Penelitian

Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas Di Wilayah Kalimantan Timur

HARI/ TANGGAL	KEGIATAN
Rabu, 29 Juni 2022	Pembentukan TIM
Jumat, 21 Oktober 2022	Zoommeeting persiapan penelitian IKN mengenai <ol style="list-style-type: none">1. Tujuan penelitian : 8 Instansi2. Hari dan tanggal penelitian : 03 November - 04 November 20223. Jadwal penelitian :<ol style="list-style-type: none">1) Kamis 03 November 2022 ke Sepaku dan PPU2) Jumat 04 November 2022 ke Balikpapan

	<p>4. Transportasi : Travel Mobil</p> <p>5. Biaya penelitian : Rp. 4.000.000, 00</p>
Rabu, 02 November 2022	<p>Zoommeeting Persiapan Kelengkapan berkas keberangkatan ke lokasi IKN tanggal 03 - 04 November 2022 :</p> <p>1. Surat Permohonan penelitian ke 8 Instansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepolisian Resor Kota Balikpapan 2) Pengadilan Negeri Balikpapan 3) Kejaksaan Negeri Balikpapan 4) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur 5) Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara 6) Kepolisian Sektor Sepaku 7) Kepolisian Sektor Penajam 8) Kepolisian Resor Penajam Utara 9) Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara <p>2. Surat Penugasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rini Apriyani, S.H.,M.H 2) Nur Aripkah, S.H.,M.H 3) Ismianingsih 4) Dea Nanda Selvia Isran 5) Andika Iqbal Inanda Rizal <p>3. Pertanyaan untuk wawancara</p>

	<p>4. Transportasi menggunakan mobil travel</p> <p>5. Perubahan rencana jadwal penelitian :</p> <p>1) Kamis 03 November 2022 ke Balikpapan dan Sepaku</p> <p>2) Jumat 04 November 2022 ke PPU</p>
Kamis, 03 November 2022	<p>1. Titik Kumpul Kampus Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Pukul 07.00 WITA dan Berangkat Pukul 08.00 WITA</p> <p>2. Tiba Pukul 11.12 WITA di Balikpapan, Observasi ke 3 Instansi dan 1 Instansi di Sepaku</p> <p>3. Akomodasi : Red Doorz Syariah Near Taman Rozelin Penajam</p>
Jumat, 04 November 2022	<p>1. Observasi 4 Instansi di PPU</p> <p>2. Pukul 12.12 WITA nyebrang ke Balikpapan</p> <p>3. Pukul 13.30 WITA tiba di Balikpapan dan Observasi di 1 Instansi di Balikpapan.</p> <p>4. Pukul 17.30 WITA kembali ke Samarinda</p>
Senin, 28 November 2022	Pembagian tugas pengerjaan Laporan Hasil Penelitian IKN.
Jumat, 02 Desember 2022	Pengumpulan Data penelitian IKN
Senin, 05 Desember 2022	Penyatuan Laporan Hasil Penelitian IKN
Selasa, 06 Desember 2022	Penjilidan Laporan Hasil Penelitian IKN

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya (Dspace, n.d.).

3. Kerangka Teoritik

Kriminalitas merupakan segala perbuatan melanggar hukum, melanggar norma-norma sosial dan agama, serta merugikan masyarakat baik secara psikologis, maupun fisik(Kartini Kartono, 1999). Kriminalitas bukanlah merupakan warisan atau bawaan sejak lahir, melainkan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang merugikan orang lain(Rafida Khairani dan Yeni Ariesa, 2020).

Membahas mengenai kriminalitas, maka tentu lekat dengan kejahatan. Adapun kejahatan menurut pandangan para ahli kriminologi secara umum adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum, merugikan, menjengkelkan,

menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan (Abintoro Prakoso, 2013). Dilihat dari sisi kriminologi, maka kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu, melainkan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat (Soedjono D, 1977). Menurut Benedict S. Alpher bahwa kejahatan merupakan "*the oldest social problem*"; kejahatan akan selalu ada dan melekat sebagai salah satu wujud dari perilaku menyimpang masyarakat (Benedict S. Alpher dalam Kartono, 2018).

Menurut Light, Keller dan Calhoun sebagaimana yang dikutip oleh Rafida Khairani dan Yenis Ariesa, kejahatan dapat dibedakan menjadi: (Rafida Khairani dan Yenis Ariesa, 2019)

1. Kejahatan tanpa korban (*crime without victims*)
2. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*)
3. Kejahatan organisasi transnasional (*transnational organized crime*)
4. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Menurut pandangan kriminologi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan atau penyebab-penyebab kejahatan, diantaranya:

1. Teori Anomie

Menurut teori ini, kejahatan disebabkan oleh mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral,

sehingga kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dapat juga dikatakan bahwa terjadi deregulasi di dalam masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap penyimpangan tingkah laku (*deviant behavior*) individu (Romli Atmasasmita, 2010).

2. Teori penyimpangan budaya

Teori penyimpangan budaya atau *cultural deviance theories*, teori ini memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan seseorang melakukan kriminal (Siswanto Sunarso, 2014).

3. Teori kontrol sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan variable-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, tingkat pendidikan, dan kelompok dominan (A.S Alam, 2010).

Berdasarkan beberapa teori tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap implikasi pemindahan ibu kota negara (IKN) terhadap potensi tingkat kriminalitas.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan non-doktrinal. Pendekatan non-doktrinal adalah pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013). Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari intensif latar belakang

keadaan saat ini, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015). Variable-variabel tersebut merupakan sasaran penelitian sebagai basis pengukuran terhadap isu hukum yang dibangun dalam penelitian ini. Eksplanasi hukum juga dibutuhkan oleh karenanya ada bantuan ilmu lain dari ilmu hukum yang mempengaruhi potensi tingkat kriminalitas di wilayah ibu kota negara baru ini (IKN).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin (BAB III, n.d.). Penelitian mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk laporan untuk memaparkan permasalahan (BAB II, n.d.).

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan **"Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas Di Wilayah Kalimantan Timur"**,. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui

penelitian (Soerjono Soekanto, 2002). Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh Peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak atau instansi terkait mengenai implikasi pemindahan ibu kota negara (IKN) terhadap potensi tingkat kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur.

Kedua, data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengkajian terhadap berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang sifatnya pelengkap, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang dapat menjadi bahan pijakan serta referensi-referensi mengenai potensi tingkat kriminalitas di daerah-daerah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dan cara yang paling relevan dengan masalah yang diangkat serta bisa dipertanggungjawabkan atas data tersebut. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu :

1) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

a) Observasi (Pengamatan)

Dalam teknik ini, dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian.

b) Wawancara (Interview)

Merupakan proses memperoleh keterangan dan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara ini ditujukan langsung kepada responden terkait dalam hal ini yaitu Aparat Penegak Hukum.

- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tinjauan Pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta refensi yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Studi kepustakaan ini guna mendukung data primer peneliti, serta memberikan informasi tentang pengaruh tata letak terhadap produktivitas kerja secara lebih mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara mendalam untuk menguraikan jawaban atau pertanyaan penelitian:

Rumusan masalah (R1)

Data yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok diantaranya, implikasi dengan adanya pemindahan IKN terhadap potensi tingkat kriminalitas, sehingga nantinya dapat diketahui apakah dengan akan berpindahnya IKN ke wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah-daerah yang menjadi pusat pembangunan IKN berpengaruh juga terhadap potensi-potensi kriminalitas di wilayah IKN tersebut. Dengan demikian, nantinya juga dapat diketahui bahwa kejahatan-kejahatan yang seperti apa nantinya yang lebih

berpotensi berkembang pesat akibat dari adanya pemindahan IKN di wilayah Kalimantan Timur.

Rumusan masalah (R2)

Variable utama pada bagian ini akan dilihat dari bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi potensi-potensi kriminalitas yang nantinya akan bermunculan setelah berpindahya IKN di Kalimantan Timur, khususnya daerah-daerah yang menjadi pusat pembangunan IKN ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tujuan 9 instansi yaitu :

- 1) Kepolisian Resor Kota Balikpapan
- 2) Pengadilan Negeri Balikpapan
- 3) Kejaksaan Negeri Balikpapan
- 4) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- 5) Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara
- 6) Kepolisian Sektor Sepaku
- 7) Kepolisian Sektor Penajam
- 8) Kepolisian Resor Penajam Utara
- 9) Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, orisinalitas penelitian.

BAB I I : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Pengertian Tindak Pidana

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai Implikasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap potensi tingkat kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi potensi berkembangnya kriminalitas di wilayah Ibu Kota Negara (IKN)

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian yang di bahas serta saran-saran yang menunjang.

DAFTAR PUSTAKA

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis bahwa saat ini dalam tataran tingkat skripsi, tesis, disertasi, maupun bentuk karya ilmiah lainnya dengan judul “Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur” belum pernah ditulis oleh orang lain. Dengan demikian, penelitian ini adalah hasil karya sendiri tanpa melakukan plagiarisme terhadap hasil penelitian orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Ibu Kota Negara (IKN)

IKN merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang pertama kali di proklamasikan yakni tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta dengan memanfaatkan peninggalan kolonialisme Belanda pada saat itu di karenakan kondisi Indonesia yang baru saja merdeka dan belum memiliki kemampuan untuk membangun dan merencanakan tempat yang tepat untuk di jadikan Ibu Kota Negara (Agama et al., 2018).

Kemudian muncul lah keinginan dari pemerintahan untuk memindahkan dan menata ulang Ibu Kota Negara baru ini dengan strategis agar di harapkan bisa meningkatkan infrastruktur dan keamanan yang lebih merata, Banyak negara juga telah melakukan perpindahan tujuannya yakni tidak lain untuk kemajuan bangsa dan negara salah satunya seperti Korea Selatan yang melakukan perpindahan ibu kota dari Seoul ke Sejong demi keamanan dan menjaukan pusat pemerintahan dari Korea Utara, dan juga negara Brazil yang melakukan perpindahan selama empat kali di karenakan populasi dan juga hal tersebut cukup efektif untuk memperkuat pertahanan dengan cara menempatkan ibu kota di bagian tengah Brasilia (Aditya & Fuadi, 2021).

Kemudian ide perpindahan ibu kota tersebut juga muncul dari pemikiran tokoh negara pertama kali di cetuskan oleh presiden pertama Indonesia yakni IR

Soekarno dengan alasan ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun ibu negara yang maju kemudian ide tersebut pun belum tercapai hingga masa pemerintahan Bapak Presiden SBY "Susilo Bambang Yudhoyono" kemudian Bapak Presiden Joko Widodo (Agama et al., 2018).

Pada tanggal 18 Januari 2022 pada masa pemerintahan Bapak Presiden joko Widodo telah mensahkan RUU "Rancangan Perundang-Undangan" menjadi Undang-Undang tentang perpindahan IKN "Ibu Kota Negara" baru menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Lama, dan Penajam Paser Utara menjadi Ibu kota baru yang kemudian menimbulkan pertanyaan adalah mengapa Kalimantan timur menjadi tempat yang di pilih untuk menjadi IKN (Ibu Kota Negara) salah satu alasanya di karnakan letaknya yang cukup strategis bertepatan di tengah Negara Republik Indonesia hal ini memudahkan pemerintahan dan juga mengatasi masalah jarak antar pulau di karnakan Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam wilayah dan pulau maka tentunya solusi perpindahan di kalimantan timur sangat strategis hingga menimbulkan dampak positif untuk pembagian infrastruktur yang di harapkan bisa merata hingga ke sebagai wilayah terpencil (Mazda, 2022)

Lokasi yang menarik dan strategis tersebut menjadi titik Nol IKN Nusantara terletak pada kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara Kalimantan timur yang saat ini menjadi tempat wisata dan proyek pembangunan, nantinya akan menjadi pusat wilayah dari pemerintahan baik kantor maupun istana Kepresidenan Republik Indonesia

Kemudian yang menjadi urgensi mengapa ibu kota di pindah dari Jakarta adalah di karenakan kepadatan penduduk yang sudah mulai membesar terutama di daerah sekitar Jakarta dan pulau Jawa efeknya beberapa wilayah mengalami kemacetan kualitas air bersih sudah mulai tercemar baik lapangan pekerjaan juga sulit untuk di dapatkan dan juga kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi alasan besar bagi negara untuk melakukan perpindahan selain daripada keinginan dari pemimpin terdahulu(Saputra et al., 2021)

Kalimantan timur sendiri adalah wilayah yang indah di penuh kebudayaan dan juga keragamannya menjadi keunikan tersendiri selain itu Kalimantan timur juga menjadi paru-parunya dunia di karenakan kelestarian flora dan faunanya seperti hutan tropis (Kalimantan et al., n.d.)

Salah satunya adalah wilayah Penajam Paser Utara kabupaten yang berasal dari provinsi Kalimantan timur yang merupakan pemekaran dari kabupaten paser pada tahun 2002 yang ke 13 di provinsi Kalimantan timur Sebagian besar penduduknya adalah masyarakat suku paser namun di karenakan wilayahnya di pinggir laut menjadi destinasi masyarakat pendatang dari suku luar seperti Sulawesi, Jawa, Nusa tengenggara hingga ke Sumatra hingga saat ini suku tersebut berdampingan dengan masyarakat suku paser keunikan lain dari wilayah tersebut adalah mereka memiliki wilayah yang terdiri dari dua bagian yaitu wilayah pantai dan wilayah pedalaman, wilayah pantainya di huni oleh beberapa pendatang yang menetap di wilayah itu Sebagian besar dari Sulawesi kemudian di wilayah pedalaman di isi oleh suku asli tersebut adalah masyarakat suku paser yang sebenarnya pusatnya berada di kesultanan paser daerah blengkong

kabupaten paser, menurut sejarah dari cerita rakyat terbut kabupaten paser memiliki historis yang cukup panjang bahkan sempat menjadi wilayah Balikpapan sebrang hingga menjadi bagian kesultanan kutai kartanegara hal ini membuat kebudayaannya memiliki kemiripan dengan kesultanan kutai kartanegara. (Mustikawati et al., 2016)

Dari keragaman kebudayaan hingga sejarah wilayah tersebut tak heran menjadikanya wilayah itu memiliki ke unikan Sehingga pemerintah tertarik itu membangun IKN (Ibu Kota Negara) di wilayah tersebut, kemudian dari perpindahan ibu kota yang dulunya berada di Jakarta kemudian di penajam pasir utara tentu menimbulkan efek baik positif maupun negative kemudian dari perfektif ini lah kami mencoba untuk meninjau efek apa saja terutama dari segi kriminalitas yang menjadi fokus utama kami, untuk melakukan penelitian ini tentu saat ini pemerintah masih melakukan transisi perpindahan dari Jakarta ke penajam paser utara hingga membawa transisi kebudayaan atau kebiasaan baru masyarakat yang kemungkinan pasti berefek kepada tingkat kriminalitas.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan permasalahan yang berhubungan dengan kriminalisasi atau di sebut *Criminal policy* yang di mana proses penetapan sebelum menjadi tindak pidana hingga menjadi tindak pidana, dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak di jelaskan secara spesifik definisi dari tindak pidana maka pengertian tersebut bersumber dari doktrin atau pandangan ahli pidana secara teoritis mengenai tindak pidana.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* memiliki berbagai macam pengertian dari ahli hukum seperti Moeljatno mengartikan sebagai perbuatan pidana sedangkan Schravendijk mengartikan sebagai perbuatan yang boleh di hukum dan sebagai peristiwa pidana tetapi kebanyakan dari pendapat tersebut menggunakan istilah tindak pidana seperti contohnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana imigrasi, tindak pidana korupsi (Prof. Dr H.M. Rasyid Ariman, 2015, p.59).

Istilah *Heet Strafbaare Feit* dapat di terjemahkan sebagai berikut

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan Pidana
3. Peristiwa Pidana
4. Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang di larang dari aturan hukum, kemudian isinya di sertai ancaman sanksi pidana tertentu barang siapa yang melanggar peraturan tersebut (Sirait Mangaranap, 2021).

Menurut Barda Nawawi Arif tindak pidana hanya membahas mengenai perbuatan objektif sedangkan yang bersifat subjektif seperti sikap batin pelaku tindak pidana harus di keluarkan karna sikap batin termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tujuannya untuk memberi kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana (Hakim Lukman, 2020).

Perbedaan pendapat tersebut di akibatkan luarsnya atau generalnya arti dari *strafbaarfeit* hingga menimbulkan perfektif-perfektif yang berbeda,

- a. melihat berbagai macam perfektif tersebut maka muncul lah beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu dapat di tentukan sebagai tindak pidana:
- b. Harus ada perbuatan Manusia
- c. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan Hukum
- d. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- e. Perbuatan itu dilarang oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan
Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepadanya (Prof. Dr H.M. Rasyid Ariman, 2015, p. 60)

Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana Umum memiliki dua jenis yakni Tindak Pidana Umum dan Kejahatan yang di atur dalam KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan di Luar KUHP.

1. Tindak Pidana Umum

Adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang peraturanya ada dalam KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar kaidah atau norma hukum dan perbuatan yang melanggar larangan yang di tetapkan hukum yang ada dalam masyarakat Menurut Sue Titus Reid kejahatan tentu merupakan penggaran hukum pidana dan dapat di beri sanksi oleh

negara karna melakukan suatu kejahatannya, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sengaja yaitu Tindakan atau kealpaan bahkan kegagalan dalam bertindak juga merupakan kejahatan apabila memiliki niat jahat(Hattu, 2020)

Delik adalah perbuatan yang dapat di pidana dalam jenis-jenisnya ada 7 yaitu

1. Delik Formal dan delik Materil

Delik formil adalah delik yang dalam perumusanya lebih mengarah ke pada perbuatanya atau perbuatan yang di larang dengan begitu delik di anggap selesai apabila pelaku telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada di dalam rumusan tersebut sedabgkan delik materil lebih menitik beratkan pada rumusan akibat perbuatannya akan tetapi apabila perbuatan pelaku telah selesai tetapi menimbulkan akibat yang tidak terjadi maka delik yang di jatuhkan paling jauh hanya di percobaan (Budi Prastowo, 2006)

2. Delik commisionis

Delik Commissionis yaitu delik yang terdiri dari melakukan perbuatan yang di larang oleh undang-undang (Siagian et al., n.d.)

3. Delik dolus dan delik culpa

Opzet atau yang di kenal delik dolus adalah melakukan sesuatu perbuatan yang di dorong oleh keinginan itu sebabnya sengaja ditunjuk terhadap suatu perbuatan, dengan sengaja itu di katakan sebagai bentuk perwujudan dari perbuatan yang di ancam oleh undang-undang pidana, menurut Moeljatno mengenai teori kehendak, kesengajaan adalah

kehendak untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang (Rais Ikhwan, 2017)

4. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat di tuntutan atau delik yang hanya akan berlaku apabila ada seseorang yang melapor atas tindak pidana tersebut penuntutan adalah suatu proses lain dalam tahapan yang berbeda berbeda dengan delik biasa adalah perbuatan tindak pidana yang dalam perbuatannya tak perlu ada pelaporan atau tuntutan dari seseorang (Hakim Lukman, 2020)

Dalam KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana memiliki 3 buku yang di dalamnya terdapat aturan yang di kategorikan

5. Buku kesatu : Ketentuan umum terdiri dari Pasal 1 asas legalitas hingga Pasal 103
6. Buku kedua : Kejahatan terdiri dari Pasal 104 kejahatan terhadap keamanan hingga Pasal 488
7. Buku Ketiga : Pelanggaran Terdiri dari Pasal 489 Mengenai pelanggaran keamanan Umum bagi orang atau Barang dan Kesehatan hingga pasal terakhir Pasal 569 (*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, n.d.).

Penggolongan tindak pidana jika di lihat dalam KUHP Kitab Undag Undang Hukum Pidana di golongkan menjadi dua bagian yaitu kejahatan "*misdrjiveb*" dengan Pelanggaran "*overtredinger*" berikut kualifikasinya :

a. Kejahatan

1. Terhadap Keamanan Pasal 104 sampai 129
2. Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 130 sampai 139
3. Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Pasal 139a sampai 145
4. Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan Pasal 146 sampai 153
5. Terhadap Ketertiban Umum Pasal 153 sampai 181
6. Perkelahian Tanding Pasal 182 sampai 186
7. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang Pasal 187 sampai 206
8. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum Pasal 207 sampai 241
9. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Pasal 244 sampai 252
10. Pemalsuan Mata Uang dan, Uang Kertas Pasal 244 sampai 252
11. Pemalsuan Meterai dan Merek Pasal 253 sampai 262
12. Pemalsuan Surat Pasal 263 sampai 276
13. Terhadap Asa-usul dan Perkawinan Pasal 277 sampai 280
14. Terhadap Kesusilaan Pasal 281 sampai 303
15. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong 304 sampai 309
16. Penghinaan Pasal 310 sampai 321
17. Membuka rahasia Pasal 322 sampai 323
18. Terhadap kemerdekaan orang Pasal 324 sampai 337
19. Terhadap Nyawa Pasal 338 sampai 350

20. Penganiayaan pasal 351 sampai 358
 21. Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan Pasal 359 sampai 361
 22. Pencurian Pasal 352 sampai 357
 23. Pemerasan dan Pengancaman pasal 368 sampai 371
 24. Penggelapan Pasal 372 sampai 377
 25. Perbuatan curang Pasal 378 sampai 395
 26. Perbuatan merugikan Pemiutang atau Orang yang mempunyai hak 396 sampai 405
 27. Menghancurkan atau merusakkan barang Pasal 406 sampai 412
 28. Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai 437
 29. Kejahatan Pelayaran Pasal 438 sampai 479
 30. Kejahatan Penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana penerbangan Pasal 479a sampai 479r
 31. Penadahan, Penerbitan dan percetakan Pasal 480 sampai 488
 32. Aturan tentang pengurangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab 486 sampai 488
- b. Pelanggaran
1. Keamanan Umum Bagi orang atau barang dan Keselamatan pasal 489 sampai 502
 2. Ketertiban Umum Pasal 503 sampai 520
 3. Terhadap penguasa Umum pasal 521 sampai 528
 4. Mengenai asal-usul perkawinan Pasal 529 sampai 530
 5. Terhadap orang yang memerlukan pertolongan Pasal 531

6. Pelanggaran Kesusilaan pasal 532 sampai 547
7. Pelanggaran mengenai tanah, Tanaman dan Pekarangan Pasal 548 sampai 551
8. Jabatan pasal 552 sampai 559
9. Pelayanan pasal 560 sampai 569 (*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, n.d.)

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tersebut

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- b. Syarat formil, Memenuhi Rumusan
- c. Syarat materil, Bersifat Melawan Hukum (Hattu, 2020)

Menurut Simons Unsur-unsur Tindak Pidana adalah

- a. Perbuatan Manusia (Negatif atau positif, melakukan atau tidak melakukan atau bahkan membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Orang yang bisa bertanggungjawab (*torek eningsvatbaar person*)

Kemudian menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam aturan pidana
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidanakan (Rusmini, 2016)

Kemudian dalam Tindak Pidana memiliki Unsur Subjektif maupun Objektif yang pertama Unsur subjektik dalam tindak pidana:

- a. Kesengajaan "*Dolus*" dan Ketidaksengajaan "*Culpa*"
- b. Percobaan "*Poging*"
- c. Merencanakan kejahatan "*Voorbadachteraad*" seperti pembunuhan berencana
- d. Kehendak dalam melakukan suatu tindak pidana "*Oogmerk*" seperti penipuan pencurian dan pemalsuan
- e. Perasaan Takut "*Vress*" seperti tindak pidana membuang anak bayi.

Kedua Unsur Objektif dalam Tindak Pidana adalah

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas yakni mengenai hubungan antara Tindakan kenyataan dan akibat

Asas legalitas sebagai pedoman dalam menetapkan seseorang sebagai tindak pidana ketentuannya terdapat dalam pasal pertama dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada, asas legalitas bertujuan untuk perlindungan atas potensi sewenang wenangan dalam menjalankan hukum pidana menurut roesan saleh menjelaskan bahwa asas legalitas sebenarnya adalah untuk menormalkan fungsi dari pengawasa hukum pidana agar tidak disalah gunakan

Selain asas legalitas terdapat asas-asas lain yang ada dalam hukum pidana

a. Asas tiada pidana tanpa kesalahan

Dalam perkembangannya asas tindak pidana tanpa kesalahan juga di sebut tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dan istilah lainya *geen straf zonder schuld* atau *no punishment without fault* asas tersebut berasal dari yurisprudensi belanda pada tahun 1916 asas ini sesuai dengan istilah sebelumnya yaitu pertanggungjawaban mengenai hukum pidana berdasarkan asas ini meski telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya maka perlu di buktikan lagi apakah perbuatanya bisa di pertanggungjawabkan menurut moeljatno dia membedakan antara tindak pidana dan juga pertanggungjawaban pidana, menurutnya tindak pidana merupakan persoalan perbuatan sedangkan mengenai apakah orang tersebut dapat di pertanggungjawabkan adalah urusan lain (Hakim Lukman, 2020)

b. Asas tidak berlaku surut

Asas tersebut dapat di artikan sebagai asas retroaktif bermakna "*nullum delictum noella sine praevia lege poenale*" artinya peraturan tersebut hanya berlaku bagi masa yang akan datang dan tidak berlaku surut sama seperti pasal 1 ayat 1 kitab undang undang hukum pidana yang di sebut asas legalitas bahwa aturan secara tegas tidak berlaku surut artinya tindak pidana tidak bisa di lakukan apabila tidak ada aturan yang mengikatnya kemudian aturan tersebut juga meringankan pelaku terdapat dalam pasal 1 ayat 2 kita undang undang hukum pidana jika

perbuatan di lakukan berubah dalam undang-undang di pakai lah aturan yang paling ringan untuk terdakwa (Islam Negeri Sunan Ampel & Yani, n.d.)

Dalam hal ini tindak pidana sangat berkaitan dengan kriminalitas yaitu kejahatan salah satu ilmu yang juga membahas tentang kriminalitas adalah kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan dari segi sosial yang dari mana berkaitan manusia yang bertetangan dengan norma sosial tertentu atau di sebut sosiologi penjahat dan fakta sosial

Kemudian ada beberapa ahli terdahulu yang juga mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

Menurut lambroso penjahat memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan ciri-ciri manusia biasa dengan manusia yang sering melakukan kejahatan terutama di bagian tengkoraknya dia menggolongkannya menjadi empat bagian

- a. *Tipe born criminal* lahir sebagai penjahat
- b. *Tipe insane criminal* yaitu penjahat yang gila di karnakan penyakit jiwa
- c. *Tipe occasional criminal* atau *criminabid* yang merupakan golongan yang banyak terjadi yakni penjahat yang tidak terlihat memiliki gangguan jiwa tetapi memiliki suasana mental dan emosi tertentu sehingga melakukan kejahatan
- d. *Tipe criminal of passion* kejahatan yang didasari cinta atau melakukan kejahatan karena cinta marah dan kehormatan

Menurut alexander dan staub juga mengkategorikan kejahatan menjadi empat tipe

1. *The neurotic criminal* ialah mereka yang melakukan kejahatan akibat dari konflik kejiwaan
2. *Normal criminal* ialah manusia yang normal namun melakukan kejahatan sebagai tujuan hidupnya
3. *The devective criminal* ialah kejahatan yang di dasari oleh gangguan jasmani dan rohani
4. *The acute criminal* ialah kejahatan yang di dasari oleh paksaan dan keadaan tertentu (Prakoso abintoro, 2017)

Kemudian tipe perkembangan kriminologi menjadi dua golongan Tipe eropa kontinental dengan tipe anglo saxon

1. Tipe eropa continental

Tipe ini berkembang di jerman dan pendekatannya lebih mengarah ke biologi sehingga bisa di sebutkan sebagai *Criminal Biologi* dalam pendekatan ini kejahatan lebih mengfokus kepada pengaruh *Glendium system* gen atau keturunan, kretschmer membagi kategori tersebut dari fisiknya kemudian ada beberapa ahli juga seperti laccasgne dan gabrielle tarde mengspesifikasikan kepada pendekatan lingkungan atau aspek sosial yang menjadi factor munculnya kejahatan.

di belanda ada tokoh terkenal kriminologi yang bernama W.A bonger yang mempunyai buku berjudul "crime and economic" buku tersebut menjelaskan factor munculnya kejahatan terdapat dalam keadaan ekonomi kemudian tokoh lain seperti kampe juga melakukan penelitian di

bagian ekonomi yang kemudian menyimpulkan selain ekonomi faktor biologis dan sosiologis juga berkaitan

2. Tipe anglo saxon

Amerika merupakan negara yang menganut system tersebut dengan padangan bahwa *American sosiological criminology* menjadi ciri dari pendekatan bahwa faktor sosiologis lah yang menjadi gambaran dalam system tersebut sehingga sampai saat ini kriminologi adalah ilmu dari sosiologi di banding dengan hukum pidana atau yuridis, kriminologi lebih luas mencakup tentang kejahatan di karnakan hukum pidana hanya berfokus kepada aturan perundang-undangan sedangkan kriminologi membahas baik dari sosiologi norma dan kebiasaan yang menjadi masalah sosial dapat terjadinya kejahatan *pathologi sosial* (priyatno dwidja, 2019)

Selain tindak pidana dalam hukum pidana memiliki istilah lain yaitu pertanggungjawaban pidana di mana kaitannya dengan pertanggungjawaban yakni mengenai aspek unsur-unsur apakah perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan

Menurut Chairul Huda menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah sebuah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindakan pidana yang dia lakukan, maka apakah bisa di pertanggung jawabkan berbicara tentang pertanggungjawaban pidana yang di mana setelah melakukan tindak pidana makan perbuatannya mesti di pertanggungjawabkan hakikatnya hal tersebut merupakan reaksi dari mekanisme hukum pidana, bahwa larangan atau ancaman yang di muat dalam aturan apabila di langgar akan mendapatkan sanksi menurut

Galliga apabila persyaratan atau muatan dalam peraturan di abaikan atau kriminal terlihat tidak muncul maka hukum dan institusinya gagal dalam memenuhi fungsinya sebagai penegak hukum (Atho Mudzhar Muhammad, 2013)

Dalam pertanggungjawaban pidana maupun tindak pidana sangat berkaitan sifat melawan hukum atau di sebut "Wederrechtelijkheid" kata tersebut memiliki berbagai macam pengertian dan makna yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum yaitu adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan tindak pidana termasuk dalam rumusan delik dan perbuatan tersebut dapat dicela
- b. Sifat melawan hukum khusus yaitu berupa syarat tertulis untuk dapat dipidananya pelaku karna melakukan perbuatan pidana dan merupakan bagian tertulis dari rumusan delik
- c. Sifat melawan hukum formal yaitu bagian tertulis dari rumusan delik yang isinya syarat untuk dapat di pidananya pelaku dari perbuatanya
- d. Sifat melawan hukum materil yaitu berupa pelanggaran atas kepentingan hukum yang dilindungi oleh pembuat aturan dalam rumusan delik tertentu (Prof. Dr H.M. Rasyid Ariman, 2015).

Dari aspek tindak pidana perlu juga di terapkan peroses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sendiri terdiri dari aparat kepolisian tentunya yang merupakan penegak hukum ganda terdepan dalam menangani segala macam kasus baik ringan maupun berat selain itu terdapat instansi lain yang juga menjadi penegak hukum yakni kejaksaan maupun hakim yang implementasinya menegakan hukum dalam persidangan.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah proses mewujudkan impian dari hukum itu sendiri agar menjadi kenyataan, kemudian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tindak pidana adalah peristiwa gejala sosial yang di hadapi masyarakat bagaimana pun usaha untuk menyelesaikannya tidak akan terselesaikan karena kejahatan itu tidak dapat di hapuskan di karenakan setiap manusia memiliki kepentingnya masing-masing maka dalam proses pencegahannya di butuhkan lah kebijakan hukum pidana (Harefa & Bukittinggi, 2019)

Hukum pidana menurut ahli hukum Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang di buat oleh negara memiliki isi mengenai aturan dari perbuatan yang tidak boleh di lakukan yakni di larang apabila di lakukan akan di kenakan sanksi yang di sebut pidana bagi siapa yang melanggar, dan juga pidana mengancam mereka yang ingin melakukan larangan larangan tersebut, kemudian bagaimana kah pidana bisa di jatuhkan, dapat di laksanakan apabila orang tersebut di sangka telah menggar aturan tersebut

Kemudian fungsi dari tujuan dari hukum pidana itu sendiri sebagai hukum public yang aman subjek adalah pelaku dan pemerintah lah yang memberikan hukuman demi kepentingan umum

Dari situ muncul lah ketegori kepentingan hukum, terdapat dalam buku "perkembangan Macam-macam pidana rangka pembangunan hukum pidana" menurut Hermien Hadiati Koeswadji yaitu

- a. Mengenai kepentingan nyawa manusia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 338 mengenai menghilangkan nyawa orang

lain dan apabila di rencanakan kententuannya pun berubah menjadi Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan apabila karena kelalaian di atur dalam Pasal 359 KUHP KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

- b. Mengenai Badan atau tubuh manusia di atur dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai perbuatan yang dapat membahayakan badan dan tubuh (Endro Purwoleksono Didik, 2014)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hukuman itu terdiri dari pokok dan tambahan:

Hukuman Pidana Pokok terdiri atas

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

Hukuman Pidana Tambahan terdiri atas

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumpulan Keputusan hakim

Tetapi ada beberapa perbedaan khusus teruntuk peradilan anak yang kualifikasi hukumanya berbeda pada pidana pada umumnya seperti berikut

Pidana pokok bagi anak terdiri atas

- a. Pidana peringanan
- b. Pidana Dengan syarat
 - 1. Pembinaan di luar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c. Latihan Kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Pidana tambahan bagi anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Kemudian penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama setengah dari hukuman orang dewasa pada umumnya.

Dalam penerapannya terdapat dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang diperuntukan untuk umum yaitu untuk masyarakat pedomanya adalah KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian dalam hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus adalah aturan pidana yang berada khusus dalam luar KUHP contohnya seperti TIPIKOR atau Tindak Pidana Korupsi ini di atur khusus untuk pidana korupsi (Huda et al., 2011).

Kemudian menurut Sudarto bahwa undang-undang pidana khusus merupakan undang-undang pidana selain KUHP Kitab Undang-undang Hukum

Pidana KUHP yang merupakan induk dari peraturan hukum pidana (Sirait Mangaranap, 2021)

Menurut Ruslan Renggong tindak pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku kepada setiap orang yaitu umum sedangkan tindak pidana khusus diperuntukan bagi orang tertentu atau delik tertentu tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup sepenuhnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian terdapat tiga kualifikasi dalam Tindak Pidana Khusus yaitu:

1. Peraturan Atau Undang-Undang Yang Tidak Terkodifikasi
2. Peraturan hukum administrasi yang isinya terdapat sanksi pidana; dan
3. Peraturan yang isinya mengandung hukum pidana khusus mengatur delik untuk sekelompok orang dan perbuatan tertentu (Fitriani, 2019).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

II. IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP TINGKAT POTENSI KRIMINALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

A. Tindak Pidana (Kriminalitas) dalam Kurung Waktu 2017-2021 di Kalimantan Timur

1. Data Tindak Pidana (Kriminalitas) di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2017

a. Data lapor gangguan kamtibmas Satker dan Satwil Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	BAB IURAN	PPU	SM D	B P P	T R K	K K R	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	K R I M S U S	J M L
A.	KEJAHATANKONVENSIONAL																		
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	0	103	478	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS /BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	10
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	0	9	3	0	8	0	0	7	0	1	2	2	0	47	0	0	0	0	79
09	PERJINAHAN	0	4	9	0	1	0	2	0	0	5	0	8	0	1	0	0	0	0	30
10	PERKOSAAN	0	3	1	3	3	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	17
11	PERMAINAN JUDI	11	55	27	6	7	6	2	3	2	7	11	0	2	5	0	0	0	0	144
12	PENGHINAAN	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	8
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	5	0	11	0	0	1	2	2	3	1	1	4	0	0	0	0	30
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBU NUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	13	261	124	2	0	13	0	16	0	26	2	6	8	0	0	0	0	0	471

17	MENGAKIBATKAN ORGMATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	18	121	85	28	110	2	32	6	21	5	40	0	24	31	0	0	523
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	9	232	226	55	61	45	31	44	52	57	9	0	17	1	0	5	844
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	4	15	48	24	12	8	8	2	12	3	2	1	0	0	0	0	139
23	PERAS/ANCAM	1	61	9	1	13	1	1	2	2	6	1	2	1	5	0	0	106
24	PENGGELAPAN	0	296	53	15	39	6	18	9	4	3	13	6	3	41	0	1	508
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	8	101	65	12	22	9	3	5	4	7	8	8	2	125	0	0	381
26	MENGHANCURKAN/MERUSAK BRG	0	25	14	2	14	0	1	6	0	3	3	2	2	0	0	0	72
27	MENERIMASUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
28	PENADAHAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	0	0	0	4
29.	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	PENYALAH GUNAAN SENPI/HAN DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
32.	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	BAB IIURAI AN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	<i>B U L</i>	<i>N N K</i>	<i>K T M</i>	<i>M L N</i>	<i>K B R</i>	R E S K R I M U M	R S K O B A	<i>P O L A I R</i>	R E S K R I M S U S	J M L
33	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PERAMPOKAN /PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42	CURANMOR R2	14	383	271	41	102	20	67	24	25	16	37	14	22	10	0	0	0	1046
43	CURANMOR R4	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
44	CURASSENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
45	CURASSAJAM	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
46	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	2	1	0	4	1	1	0	1	0	1	0	1	0	13
48	PENGEROYOKAN	1	98	79	7	25	9	6	8	2	3	8	0	6	2	0	0	0	254
49	SAJAM	1	47	20	11	13	4	4	4	2	2	3	4	4	5	0	0	0	124
50	UANG PALSU	1	0	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
51	PEMBUNUHAN	0	7	6	1	2	1	3	4	1	0	5	1	1	3	0	0	0	35
52	PORNOGRAFI	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
53	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	CURWATLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	LAKA KERJA	1	0	1	0	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	10

64	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
65	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
67	MIRAS	0	1	0	0	2	0	0	2	1	0	4	0	0	1	1	0	4
68	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
B	KEJ. TRANSNASIONAL																		
01	NARKOTIKA	52	408	276	260	252	81	72	107	234	177	122	180	67	0	192	6	0	2486
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5

05	PENCUCIAN UANG/ MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
06	KEJDUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI/ ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJTRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	52	408	276	262	253	81	72	107	235	177	122	180	67	1	192	6	6	2497

NO	BAB IIIURAIAN	PPU	SM D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
70	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
71	MERSK, GAR KESOPANAN/ KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

73	MERUGIKAN PEMIUTANG/ ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	MENGHANCU RKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	LAKA LANTAS	4 1	17 1	1 1 2	4 5	1 7 1	5 8	1 0 7	4 7	3 7	1 8	7 1	1 3	8 6	0	0	0	0	9 7 7
79	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	KEJAHATAN KONVENSI ALAINNYA	0	7	1 8	4	3	0	3	0	0	7	0	0	0	1 4	0	0	0	5 6
84	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	GULPOK RADIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	CABUL	0	31	3 4	3	0	2	1 0	2	1	1 5	2 4	0	0	2	0	0	0	1 2 4
88	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
89	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

91	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	JUMLAH	1 2 5	20 52	1 7 1 2	2 6 4	6 4 7	1 9 0	2 9 8	2 2 3	1 6 9	2 0 9	2 4 8	7 5	1 8 1	3 1 0	0	9	3	6 7 1 5

NO	BAKURAI AN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOB	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
C KEJ THDP KEKAYAAN NEGARA																			
01	KORUPSI	1	2	1	1	0	2	0	3	1	4	3	0	0	0	0	0	6	24
02	ILLEGAL LOGGING	19	1	6	5	7	0	0	5	1	2	9	0	16	0	0	2	0	73
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	0	20
04	ILLEGAL MINING	0	1	0	1	5	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	2	0	15
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
07	BBM ILLEGAL	4	2	3	1	8	7	6	11	0	0	3	0	1	0	0	4	1	51
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
09	IT	0	0	1	5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	13	24
10	PERBANKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

11	PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
12	KARANTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	8
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
15	PERTAMBAHAN	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	24
16	UU KEPABEANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	0	1	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	12
JUMLAH		25	7	12	18	28	9	8	27	16	10	26	6	17	1	0	30	49	289	

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	--------	--------	------------	-----

D KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI																			
01	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
E	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)																		
01	PELANGGARA N HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHA N (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHA N (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAA N/KEBEBASA N FISIK LAIN SECARA SEWENANG- WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIO NAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

07	PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAA N THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK, RAS, KEBANGSAAN ,ETNIS, BUDA YA, AGAMA, JN S KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENUJU HUKUM INTERNASIO NAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANG AN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAA N OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARA N DLM HAL PENYAMPAIA N PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	1	75	18	12	18	5	3	3	2	3	1	0	0	3	0	0	144

14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	6	72	17	24	44	20	9	24	18	0	2	0	16	6	0	0	0	258
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	7	147	35	36	62	25	12	27	20	3	3	0	16	9	0	0	0	402
NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
F	PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA																		
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
G	PELANGGARAN HUKUM PIDANA																		
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAA N THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT , MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAA N RINGAN	2	28	45	27	62	1	17	0	16	0	18	7	13	3	0	0	0	239
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	--------------

16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAA N BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN, MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYALALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYAKEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
3 1	MINTA- MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2	GELANDANG AN /TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIA N MENGEMBAR A KE MANA- MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATA N NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	TANPA IJIN POLRI(PEGA WAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKA N PESTA UMUM DAN PAWAIDI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 6	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK- ARAKANDI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 7	SEBAGAI MATA PENCAHARIA N MENJALANKA N PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 8	LALAI TIDAK MEMBERITAH UKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHAN NYA . LALAI MEMBERITAH U KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGALDI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKA N BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKA N/MEMPERLI HATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKA N LAGU- LAGU, PIDATO, MENGADAKA N GAMBAR/TUL ISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	NYATA MABUK/KENT ARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNY A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
H	GANGGUAN THDP. ORANG																		
1	PENEMUAN MAYAT	5	0	6	3	1	0	0	7	3	3	2	0	1	0	0	0	0	3 1
2	BUNUHDIRI	1	0	0	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8
3	TEMU BAYI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/ KERAS/ BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	6	0	7	4	3	0	1	8	3	5	2	0	1	0	0	0	0	4 0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	9	0	0	0	17
59	JABATAN	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	19
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

JUMLAH	2	29	60	29	62	2	17	0	16	0	18	8	15	17	0	1	0	276
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
I	GANGGUAN THDP. BARANG																		
1	KEBAKARAN	9	37	12	0	2	1	0	4	5	0	11	1	1	0	0	0	0	83
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	9	37	12	0	2	1	0	4	5	0	11	1	1	0	0	0	0	83

NO	BAB VURAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
29	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

30	MERUGIKAN PEMIUTANG/ ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MENGHANCU RKAN A TAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	LAKA LANTAS	4 3	11 8	1 1 2	4 8	1 4 6	7 0	7 3	3 4	9	6	7 3	1 3	8 8	0	0	0	0	8 3 3
36	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KEJAHATAN KONVENSI ONAL LAINNYA	0	3	1 6	2	3	0	0	0	0	7	0	0	0	9	0	0	0	4 0
41	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	GULPOK RADIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	CABUL	0	35	2 0	0	0	2	8	0	0	0	2 7	2	0	1	0	0	0	9 5
45	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
46	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	JUMLAH	103	1392	1189	71	437	182	174	163	78	128	205	73	154	177	0	9	2	4537

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
J	GANGGUAN THDP HEWAN																		
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
K	BENCANA																		
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	BAB VIURAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	<i>B U L</i>	<i>N N K</i>	<i>K T M</i>	<i>M L N</i>	<i>K B R</i>	RESKRIMUM	RSKOBA	<i>P O L A I R</i>	RESKRISUS	JML
A	KEJAHATANKONVENSIONAL																		
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	0	98	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	6
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	9
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	0	5	5	0	4	0	0	0	0	0	1	2	0	23	0	0	0	40
09	PERJINAHAN	0	3	2	0	1	0	2	0	1	4	0	7	0	1	0	0	0	21
10	PERKOSAAN	0	2	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	9
11	PERMAINAN JUDI	10	55	30	0	7	6	2	2	3	13	7	0	3	5	0	0	0	143

1 2	PENGHINAAN	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	8
1 3	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	1	0	0	0	7	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1 2
1 5	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNU HAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6	PENGANIAYA AN BERAT	8	19 7	8 8	0	0	1 3	0	1 1	0	1 8	0	7	7	0	0	0	0	0	3 4 9
1 7	MENGAKIBAT KAN ORG MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1 8	MENGAKIBAT KAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 9	PENCURIAN BIASA	1 2	79	7 2	4	6 8	2	1 5	3	6	4	2 6	6	1 7	2 1	0	0	0	0	3 3 5
2 0	PENCURIAN DG PEMBERATAN	4	13 6	9 7	0	3 5	3 6	1 3	3 9	3 5	3 2	3	3	9	2	0	5	0	0	4 4 9
2 1	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2 2	PENCURIAN DGN KEKERASAN	2	14	1 5	6	5	8	4	2	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6 8
2 3	PERAS/ANCA M	1	44	1 2	0	1 2	1	1	2	1	5	1	1	1	3	0	0	0	0	8 5
2 4	PENGGELAPA N	0	14 8	3 2	1	2 8	5	9	3	3	1	1 0	4	2	2 6	0	1	1	1	2 7 4
2 5	PENIPUAN/PE RBUATAN CURANG	8	67	2 7	0	1 2	6	2	3	1	2	5	3	2	4 1	0	0	0	1	1 8 0
2 6	MENGHANCU RKAN / MERUSAK BRG	0	14	1 3	1	8	0	0	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4 4

27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
28	PENADAHAN	3	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	32
50	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
53	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	BAB VIIURAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML	
56	PERAMPOKAN /PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	PERDAGANGAN MANUSIA /TRAFFICKING IN PERSON (DLM.NEG/LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

59	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY (DLM.NEG/LO KAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	CURANMOR R2	7	21 2	7 8	6	3 6	1 4	3 1	1 7	3	1 4	3 2	9	1 3	1 6	0	0	0	4 8 8
64	CURANMOR R4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
65	CURASSENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
66	CURASSAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HAND AK	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0	1	0	9
69	PENGEROYOK AN	1	69	5 0	3	2 2	8	6	6	2	0	6	0	4	3	0	0	0	1 8 0
70	SAJAM	1	46	2 5	0	1 3	4	4	4	1	1	3	5	3	5	0	0	0	1 1 5
71	UANG PALSU	1	0	3	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0
72	PEMBUNUHAN	0	8	5	0	0	1	4	3	1	0	4	0	2	4	0	0	0	3 2
73	PORNOGRAFI	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
74	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79	CURWATTLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
81	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
83	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
84	LAKA KERJA	1	0	1	0	4	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1		
85	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
86	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
88	MIRAS	0	1	0	0	2	0	0	2	1	0	4	0	0	0	1	0	1	0	4	8
89	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	THDP ASAL USULDAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
92	MERSK, GAR KESOPANAN/ KESSLAAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. data penyelesaian gangguan kantibmas Saker / Satwil Tahun 2017 sebagai berikut :

N O	BAB VIII UR AIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
C	KEJ THDP KEKAYAAN NEGARA																		
01	KORUPSI	1	2	1	0	0	2	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	9	23
02	ILLEGAL LOGGING	16	1	6	0	7	0	0	4	3	2	3	0	14	0	0	2	0	58
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	0	21
04	ILLEGAL MINING	0	1	0	0	5	0	0	1	18	0	0	2	0	0	0	0	3	30
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
06	KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
07	BBM ILLEGAL	6	2	3	0	8	7	6	2	0	0	2	0	1	0	0	4	1	42
08	UU PERKEBUNAN	0	0		0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	IT	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8

10	PERBANKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
11	PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
13	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
14	PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15	PERTAMBAHAN	0	0	0	0	6		0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	11
16	UU KEPABEANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	UU PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
20	PALSU PRODUK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	9
22	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	9
JUMLAH		24	6	13	0	28	9	9	12	28	5	14	6	16	1	0	28	43	242	

NO	URAIAN	P P U	S M D	B P P	TR K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
B KEJ. TRANS NASIONAL																			
01	NARKOTIKA	39	408	231	137	252	81	73	84	261	172	122	180	57	0	161	3	0	2261
02	TERORISME	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
05	PENCUCIAN UANG/MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI/ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JUMLAH	3 9	4 0 9	2 3 1	1 3 7	2 5 2	8 1	7 3	8 4	2 6 2	1 7 2	1 2 2	1 8 0	5 7	2	1 6 1	3	5	2 2 7 0
---------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------	----------------------	----------	----------	----------------------------

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
D	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI																		
01	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NNK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
E	PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)																		
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAA N/KEBEBASA N FISIK LAIN SECARA SEWENANG- WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIO NAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PEL ACURAN SECARA PAKSA,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAA N THDP SUATU POK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS, KEBANGSAAN ,ETNIS,BUDA YA ,AGAMA,JN S KELAMIN/ALA SAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIO NAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANG AN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	TORTURE (PENGANIYAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	1	60	6	1	17	5	3	2	0	4	0	0	2	3	0	0	0	104
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	7	52	4	1	37	19	9	20	17	0	0	0	9	5	0	0	0	180
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8	112	10	2	54	24	12	22	17	4	0	0	11	8	0	0	0	284

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
G	PELANGGARAN HUKUM PIDANA																		
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBUKAN RUSAKNYA MATERAI(SE GEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	PENGANIYAA N THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT , MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	KARENA SALAHNYA ORG MENJADI ERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PENGANIYAA N RINGAN	4	13	23	3	55	1	15	0	9	0	14	0	8	6	0	0	0	151
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPA N RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	PPU	SMD	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKA N RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 1	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK- ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGG U KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 4	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAA N BERGERAK DI JALAN UMUM(MERI NTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN, MENYUSAHK AN DAN MENDATANG KAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUA YANG DPT MEMBAHAYA KAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH PADA WAKTU MALAM /WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN /TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
3 3	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAIDI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 6	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITA HUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITA HU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGALDI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	PPU	SM	BPP	TRK	KTI	BTG	PSR	BRU	BUL	NK	KTM	MLN	KBR	RESKRIMUM	RSKOBA	POLAIR	RESKRIMSUS	JML
F	PELANGGARAN HUKUM NONPIDANA																		

1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	P P U	S M D	B P P	T R K	K T I	B T G	P S R	B R U	B U L	N N K	K T M	M L N	K B R	R E S K R I M U M	R S K O B A	P O L A I R	R E S K R I M S U S	J M L
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

44	NYATA MABUK/KEN TARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI DGN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	KEBAKARAN	9	37	1	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	61
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TAHAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	37	1	0	1	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	61

c. Rekapitulasi gangguan kamtibmas dan penyelesaian berdasarkan penggolongan jenis kejahatan:

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	KEJAHATAN KONVENSIONAL	83 48	55 85	66 %	75 16	50 98	67 %	T 832 (9 %)
2	KEJAHATAN TRANS NASIONAL	29 12	24 40	83 %	24 97	22 70	90 %	T 415 (14 %)
3	KEJ. KEKAYAAN NEGARA	24 9	17 9	71 %	28 9	24 2	83 %	N 40 (16 %)
4	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		115 09	82 04	71 %	103 02	76 10	73 %	T 1207 (10 %)

d. Gangguan kamtibmas dan penyelesaian persatwil sebagai berikut:

N	KESATUA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TREND
---	---------	------------	------------	-------

o	N	L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	RESTA SAMARINDA	3315	2030	61 %	2680	1972	73 %	T 635 (19 %)
2	RES BALIKPAPAN	2188	1616	73 %	2114	1489	70 %	T 74 (3 %)
3	RES KUKAR	1430	1168	81 %	1057	832	78 %	T 373 (26 %)
4	RES TARAKAN	658	538	81 %	613	214	34 %	T 45 (6 %)
5	RES PASER	510	311	60 %	408	291	71 %	T 102 (20 %)
6	RES KUTIM	471	358	76 %	430	364	84 %	T 41 (8 %)
7	RES NUNUKAN	469	395	84 %	404	314	77 %	T 65 (13 %)
8	RES BERAU	411	287	69 %	396	281	70 %	T 15 (3 %)
9	RES BULUNGAN	383	258	67 %	464	394	84 %	N 81 (21 %)
10	RES BONTANG	359	221	61 %	308	297	96 %	T 51 (14 %)
11	RES KUBAR	291	162	55 %	298	246	82 %	N 7 (2 %)
12	RES PPU	235	184	78 %	226	193	85 %	T 9 (3 %)
13	RES MALINAU	219	193	88 %	270	259	95 %	N 51 (23 %)
14	DITRESNAR KOKA	242	204	84 %	192	161	83 %	T 50 (20 %)

15	DIT RESKRIMUM	237	212	89 %	338	213	63 %	N 101 (42 %)
16	DIT POLAIR	46	43	93 %	46	40	86 %	TTP
17	DITRESKRIMSUS	45	24	53 %	58	50	86 %	N 13 (28 %)
JUMLAH		11.509	8.204	71 %	10.302	7.610	73 %	T 1207 (10 %)

e. 10 Kasus tertinggi Tahun 2015

NO	KASUS	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	2902	2438	84 %	2486	2261	90 %	T 416 (14 %)
2	CURANMOR	1372	686	50 %	1068	491	45 %	T 304 (22 %)
3	CURAT	1075	526	48 %	844	449	53 %	T 231 (21 %)
4	CURBIS	638	336	52 %	523	335	64 %	T 115 (18 %)
5	PENGGELAPAN	653	366	56 %	508	274	53 %	T 145 (22 %)
6	ANIAYA BERAT	578	463	80 %	471	349	74 %	T 107 (18 %)
7	PENIPUAN	370	226	61 %	381	180	47 %	N 11 (29 %)
8	PENGEROYOKAN	286	178	62 %	254	180	70 %	T 32 (11 %)
9	ANIRING	243	192	79 %	239	151	63 %	T 4 (16 %)
10	CURAS	111	71	63 %	139	68	48 %	N 28 (25 %)

JUMLAH	822 8	548 2	66 %	691 3	473 8	68 %	T 1315 (15 %)
---------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	--------------------------

f. Rekapitulasi laka lantasi Persawil sebagai berikut:

NO	SATWIL	TAHUN 2016						TAHUN 2017					
		JML LAKA	SE LESAI	KORBAN			RUMAT	JML LAKA	SE LESAI	KORBAN			RUMAT
				M D	L B	LR				M D	L B	LR	
1	KUKAR	133	121	43	135	125	Rp ,665,390,000	171	147	20	116	160	Rp 2,197,000,000
2	PASER	85	65	55	15	74	Rp 483,125,000	107	73	52	6	91	Rp 456,800,000
3	SAMAR INDA	84	46	52	37	26	Rp 136,985,000	171	118	41	49	125	Rp 615,400,000
4	TARAK AN	68	60	18	33	50	Rp 62,150,000	45	48	23	1	43	Rp 93,000,000
5	KUTIM	61	67	47	27	7	Rp 481,200,000	71	73	13	31	19	Rp 420,500,000
6	BALIKP APAN	45	45	9	26	40	Rp 180,200,000	112	112	4	53	89	Rp 126,100,000
7	BONTA NG	44	39	37	21	12	Rp 273,500,000	58	70	15	9	52	Rp 370,400,000
8	PPU	43	38	31	20	21	Rp 183,050,000	41	43	21	20	28	Rp 134,250,000
9	BERAU	33	30	32	9	16	Rp 121,200,000	47	34	29	19	37	Rp 225,100,000
10	KUBAR	23	17	18	13	3	Rp 167,700,000	86	88	14	22	49	Rp 559,300,000
11	BULUN GAN	19	18	12	9	8	Rp 29,900,000	37	9	18	22	16	Rp 147,980,000
12	NUNUK AN	16	16	11	10	11	Rp 54,800,000	18	6	13	3	20	Rp 34,000,000
13	MALIN AU	13	13	12	7	4	Rp 198,500,000	13	13	8	11	7	Rp 187,000,000
JML		667	575	37	36	397	Rp 4,037,700	977	833	27	36	736	Rp

			7	2		0,000			1	2		5,566,830,000
--	--	--	---	---	--	-------	--	--	---	---	--	---------------

g. **Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Persawil sebagai berikut :**

NO	SATWIL	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
		TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA	TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA
1	DITLANTAS	3647	584	4231	Rp	5,530	3,100	8,630	Rp -
2	SAMARINDA	13605	7043	20648	Rp 850,337,000	17,185	24,733	41,918	Rp 1,957,945,000
3	BALIKPAPAN	12230	2969	15199	Rp 335,000,000	12,682	27,190	39,872	Rp 1,408,206,000
4	TARAKAN	11714	4540	16254	Rp 397,091,000	8,100	15,746	23,846	Rp 889,401,000
5	BERAU	4274	554	4828	Rp 225,290,500	5,000	11,858	16,858	Rp 14,350,000
6	KUKAR	6342	1297	7639	Rp 826,389,000	11,074	17,167	28,241	Rp 1,338,333,000
7	PASER	4154	1770	5924	Rp 2,656,750,000	5,176	9,769	14,945	Rp 4,550,400,000
8	BONTANG	2966	1644	4610	Rp 382,950,000	4,644	4,313	8,957	Rp 384,850,000
9	BULUNGAN	2430	904	3334	Rp 144,314,000	2,951	6,821	9,772	Rp 453,030,000
10	NUNUKAN	1611	1632	3243	Rp 70,258,000	2,097	4,840	6,937	Rp 99,323,000
11	MALINAU	1811	344	2155	Rp 864,750,000	1,989	4,216	6,205	Rp 1,039,050,000

1 2	KUTIM	629 4	3039	933 3	Rp 242,300,0 00	10, 398	13,98 1	24,3 79	Rp 914,689,00 0
1 3	KUBAR	139 1	3185	457 6	Rp 133,388,0 00	1,6 51	15,80 9	17,4 60	Rp 155,314,00 0
1 4	PENAJ AM	319 6	3003	619 9	0	4,1 80	9,692	13,8 72	Rp 378,004,80 0
JUMLAH		75 66 5	325 08	10 81 73	Rp 7,128,81 7,500	92, 65 7	169, 235	261 ,89 2	Rp 13,582,8 95,800

Berdasarkan data-data kriminalitas pada tahun 2017 di wilayah Kalimantan Timur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Jumlah tindak pidana pada tahun 2017 sebanyak **10.302** kasus, apabila dibandingkan dengan 2016 sebanyak **11.509** kasus, maka mengalami penurunan sebanyak **1.207** kasus (10 %).
- b. Penyelesaian tindak pidana tahun 2017 sebanyak **7.610** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak **8.204** kasus, maka mengalami penurunan sebanyak **594** kasus. (7.2 %).
- c. Persentase Penyelesaian tindak pidana pada tahun 2017 sebesar **73 %** sedangkan pada tahun 2016 sebesar **71 %** maka mengalami kenaikan sebanyak **2 %**.
- d. Laka lantas pada tahun 2017 sebanyak **977** kasus (MD 271 org, LB 362 org, LR 736 org, Rumat Rp 5,566,830,000,-), apabila dibandingkan dengan 2016 sebanyak **667** kasus (MD 377 org, LB

362 org, LR 397 org, Rumat Rp 4,037,700,000,-), maka mengalami kenaikan sebanyak **310** kasus (68 %).

- e. Pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2017 sebanyak **261,892 gar** (tilang 92.657, teguran 169.235 dan Rumat Rp 13,582,895,800,-), apabila dibandingkan dengan 2016 sebanyak **108.173 gar** (tilang 75.665, teguran 32.508 dan Rumat Rp 7,128,817,500,-), maka mengalami kenaikan sebanyak **153.719** kasus (41 %).
- f. Resiko terkena tindak pidana per 100.000 penduduk pada tahun 2017 sebesar 252 orang, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 284 orang, maka resiko terkena tindak pidana mengalami penurunan sebesar 32 kasus per 100.000 orang.
- g. Selang waktu terjadinya tindak pidana tahun 2017 sebesar 51 menit 60 detik, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4 menit 33 detik, berarti mengalami perlambatan waktu kejadian perkara sebesar 47 menit 27 detik.

2. Data Tindak Pidana (Kriminalitas) di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2018

- a. **Data lapor gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2018 sebagai berikut :**

NO	BAB IXURAIAN	S M D	B P P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	R E S K R I M U M	D I T N A R K O B A	D I T K R I M S U S	J M L
A. KEJAHATANKONWENSIONAL														

01	TTHD KETERTIBAN UMUM	59	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/ BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
07	PEMALSUAN TTD	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6
08	PEMALSUAN SURAT	5	2	1	0	0	4	2	0	0	39	0	0	2	55
09	PERJINAHAN	7	6	1	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	20
10	PERKOSAAN	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7
11	PERMAINAN JUDI	23	17	5	10	4	10	1	5	12	10	0	0	0	97
12	PENGHINAAN	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	3	2	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	13
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	170	109	0	5	0	1	2	9	0	0	0	0	0	296
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	97	92	40	7	17	4	26	13	17	20	0	0	0	333
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	192	255	14	25	24	28	12	2	16	0	0	4	0	572
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	16	42	5	2	5	3	1	0	2	0	0	0	0	76
23	PERAS/ANCAM	33	20	3	2	0	2	0	1	0	5	0	0	0	66
24	PENGGELAPAN	163	59	18	4	15	3	18	6	12	32	0	1	0	331
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	97	57	12	9	2	10	3	1	0	101	0	0	6	298
26	MENGHANCURKAN/ MERUSAK BRG	9	15	9	1	0	2	3	0	5	5	0	0	0	49
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

93	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	CURANMOR R2	217	141	0	2	26	18	15	4	4	26	0	0	0	453
107	CURANMOR R4	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
108	CURASSENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	CURASSAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	3	2	0	3	0	0	0	0	9
112	PENGEROYOKAN	63	49	12	3	3	6	11	3	6	1	0	0	0	157
113	SAJAM	30	31	7	3	4	18	9	2	2	5	0	0	0	111
114	UANG PALSU	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
115	PEMBUNUHAN	5	7	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	19
116	PORNOGRAFI	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

N O	BAB XURAIAN	S M D	B P P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	R E S K R I M U M	D I T N A R K O B A	<i>D I T P O L A I R</i>	D I T K R I M S U S	J M L
117.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121.	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127.	LAKA KERJA	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	1	0	6
128.	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
129.	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
131.	MIRAS	0	0	29	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	34
132.	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLN YA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSLA AN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139.	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140.	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

142.	LAKA LANTAS	1 4 3	1 2 4	1 1 7	6 2	6 8	8 0	39	4 1	4 9	0	0	0	0	723
143.	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	KEJKONVENSIONAL LA INNYA	1 2	1 2	0	1	4	1	1	0	3	4	0	0	0	37
148.	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.	PENISTAAN AGAMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
151.	CABUL	2 0	3 8	0	0	2	0	17	0	0	0	0	0	0	77
152.	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1 3 7 5	1 5 0 3	2 8 3	1 4 2	1 8 2	2 0 1	17 0	9 2	1 3 4	2 6 5	0	6	8	436 1
B. KEJAHATAN TRANS NASIONAL															
01	NARKOTIKA	2 3 6	3 3 6	2 3 1	9 2	8 7	1 3 0	11 4	8 1	5 4	0	21 6	5	0	158 2
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPIKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LA INNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2 3 6	3 3 6	2 3 3	9 2	8 7	1 3 0	11 4	8 1	5 4	0	21 6	5	3	158 7

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T P O L A I R	DI T KR I M S U S	JM L
C. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
01	KORUPSI	2	3	5	2	1	2	1	3	1	0	0	0	10	30
02	ILLEGAL LOGGING	0	7	0	0	4	7	9	5	1	0	0	1	0	34
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
04	ILLEGAL MINING	4	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	13
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	8
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
07	BBM ILLEGAL	0	0	6	0	2	7	0	2	0	0	0	1	0	18
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
09	IT	5	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	5	17
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
11	P. KONSUMEN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PERTAMBANGAN	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	8	14
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	PEL WIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	1	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	8	19
	JUMLAH	15	14	20	2	7	22	19	12	5	0	0	12	50	178
D. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI															
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LA WAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BUDAYA,AGAMA,,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APARAT)														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T P O L A I R	D I T K R I M S U S	JML
12	PELANGGARAN DIM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	61	31	3	4	4	1	1	1	1	2	0	0	0	109
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	61	18	34	13	7	25	1	13	11	6	0	0	0	189
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	122	49	37	17	11	26	2	14	12	8	0	0	0	298
F. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA															
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	PENGANIYAAAN THDP BINA TANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	14	34	31	0	12	20	23	3	9	2	0	0	148
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENA KALAN THDP ORANG A TAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LA LIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAA N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	B TG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T P O L A I R	D I T K R I M S U S	JM L
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBA DAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGALDI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINATANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINATANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PIDANA																
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAMUMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DITNARKOBA	<i>DI T POLAIR</i>	DITKRIMSUS	JML		
56	TTG ORG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	21	0	0	0	0	25	
59	JABATAN	0	26	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	30	
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3		
	JUMLAH	16	60	31	0	12	20	25	3	9	27	0	2	1	206		
H. GANGGUAN THDP. ORANG																	
1	PENEMUAN MAYAT	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
3	TEMU BAYI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	5	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11
GANGGUAN THDP. BARANG															
1	KEBAKARAN	4	3	9	0	0	0	0	0	15	1	6	0	0	74
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	3	9	0	0	0	0	0	15	1	6	0	0	74
I. GANGGUAN THDPHEWAN															
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. Data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2018 sebagai berikut :

NO	BAB XIURAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
K. KEJAHATANKONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
07	PEMALSUAN TTD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
08	PEMALSUAN SURAT	2	1	1	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	32

8											3				
09	PERJINAHAN	6	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	13
10	PERKOSAAN	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
11	PERMAINAN JUDI	23	21	5	10	4	7	5	5	15	10	0	0	0	105
12	PENGHINAAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	119	79	0	5	0	1	1	4	0	0	0	0	0	209
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	57	86	34	7	6	3	29	10	16	28	0	0	0	276
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	152	123	12	25	16	25	9	1	16	1	0	4	0	384
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	11	17	5	2	3	3	1	0	3	1	0	0	0	46
23	PERAS/ANCAM	21	12	2	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0	42
24	PENGGELAPAN	105	33	14	4	10	2	10	5	2	34	0	1	0	220
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	49	15	8	9	2	8	2	1		85	0	0	7	186
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	4	5	8	1	0	1	0	0	5	2	0	0	0	26
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	13	8	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	27
29	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
32	KEJ. NARKOTIKA (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	TERORISME (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	CURANMOR R2	1 2 7	5 2	0	2	1 1	1 8	14	4	3	2 7	0	0	0	25 8
43	CURANMOR R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	CURASSENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	CURASAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	3	1	0	3	3	0	0	0	11
48	PENGEROYOKAN	4 1	3 2	9	3	2	5	13	2	6	1	0	0	0	11 4
49	SAJAM	3 0	2 8	7	3	4	1 4	3	2	2	5	0	0	0	98
50	UANG PALSU	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
51	PEMBUNUHAN	4	1 1	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	23
52	PORNOGRAFI	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
53	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	KENA KALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	LAKA KERJA	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
64	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
65	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
67	MIRAS	0	0	2 9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30
68	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
73	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	LAKA LANTAS	231	106	118	64	93	51	42	39	50	0	0	0	0	794
79	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	19	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	32
84	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	CABUL	23	23	0	0	2	0	13	0	0	2	0	0	0	63
88	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1082	1086	262	142	159	151	153	77	127	243	0	6	7	3495
L. KEJAHATAN TRANS NASIONAL															
01	NARKOTIKA	265	290	230	75	73	98	85	78	42	0	170	5	0	1411
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	KEJDUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ. TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	265	290	231	75	73	98	85	78	42	0	170	5	0	1412
M. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
0	KORUPSI	1	2	5	2	1	1	3	1	0	0	0	0	8	24

1															
02	ILLEGAL LOGGING	0	6	0	0	4	3	6	5	4	0	0	1	0	29
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
04	ILLEGAL MINING	3	0	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	13
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
07	BBM ILLEGAL	0	0	6	0	2	7	2	3	0	0	0	1	0	21
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
09	IT	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	11
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	P. KONSUMEN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PERTAMBANGAN	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	9
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	5	10
	JUMLAH	10	11	20	2	7	14	16	10	8	0	0	12	25	135
	N. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WA PRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PERKELAHIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	TANDING SATU LAWAN SATU														
1 1	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)														
0 1	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 2	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 4	PENGUSIRAN A TAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 5	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEB EBASAN FISIK LA IN SECARA SEWENANG- WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 6	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 7	PERKOSAAN,PERBU DAKAN SEKSUAL,PELACURA N SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 8	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBAN GSAAN,ETNIS,BUDA YA,AGAMA,JNS KELAMIN/A LASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILA RANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 9	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	4	5	3	4	4	1	1	1	0	2	0	0	0	62

3		1													
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	40	5	32	11	7	18	0	12	10	5	0	0	0	140
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	81	10	35	15	11	19	1	13	10	7	0	0	0	202

NO	BAB XI URAIAN	SM D	BP P	KK R	BT G	PS R	BR U	KT M	KB R	PP U	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
P. PELANGGARAN HUKUM NONPIDANA															
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPATHIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q. PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MERUSAK KESEHATAN														
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	11	30	31	0	8	18	12	2	8	2	0	0	0	122
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENA KALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	KEBAKARAN/KECELAKAAN														
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWADI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 9	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEM PERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG- UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG/ ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CACAT, P INCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA														
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAMUMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	19
59	JABATAN	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	JUMLAH	14	48	31	0	8	18	12	2	8	18	0	2	1	162

NO	BAB XIIIURAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DITNARKOBA	DITPOLAIR	DIKRIMSUS	JML
	R. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	3	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	8
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TEMU BAYI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING														
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	4	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	9
S. GANGGUAN THDP. BARANG															
1	KEBAKARAN	4	3	2	0	0	1	1	0	11	0	5	0	0	72
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	3	2	0	0	1	1	0	11	0	5	0	0	72
T. GANGGUAN THDPHEWAN															
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. Rekapitulasi gangguan kamtibmas dan penyelesaian berdasarkan penggolongan jenis kejahatan sebagai berikut:

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1.	KEJAHATAN KONVENSIONAL	666	470	70 %	495	39	79 %	T 1719 (25 %)
2	KEJAHATAN TRANS NASIONAL	164	151	92 %	158	14	88 %	T 56 (3 %)
3.	KEJ. KEKAYAAN NEGARA	239	203	84 %	178	13	75 %	T 61 (25 %)
4.	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	8.5	6.4	75 %	6.7	5.4	81 %	T 1.836 (21 %)

d. Gangguan kamtibmas dan penyelesaian persatwil sebagai berikut :

N o	KESATUA N	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TREND
		L	S	% SELR A	L	S	% SELR A	
1	DITRESNAR KOBAB	192	161	83 %	216	170	78 %	N 24 (12 %)
2	DITRESKRI MUM	338	213	63 %	300	268	89 %	T 38 (11 %)
3	DIT POLAIR	46	40	86 %	25	25	100 %	T 21 (45 %)
4	DITRESKRI MSUS	58	50	86 %	62	33	53 %	N 4 (6 %)
JUMLAH		634	464	73 %	603	496	82 %	T 31 (4 %)
1	RESTA SMDA	2680	1972	73 %	1807	1495	82 %	T 873 (32 %)
2	RES BPP	2114	1489	70 %	1976	1451	73 %	T 138 (6 %)
3	RES KUKAR	1057	831	78 %	606	580	95 %	T 451 (42 %)
4	RES KUTIM	430	364	84 %	345	278	80 %	T 85 (19 %)
5	RES PASER	408	291	71 %	303	271	89 %	T 105 (25 %)
6	RES BERAU	396	281	70 %	399	300	75 %	N 3 (1 %)
7	RES BTG	308	297	96 %	253	234	92 %	T 55 (17 %)
8	RES KUBAR	298	246	82 %	203	180	88 %	T 95 (31 %)
9	RES PPU	226	193	85 %	220	202	91 %	T 6 (2 %)
JUMLAH		7917	5964	75 %	611 2	499 1	81 %	T 1805 (22 %)
TOTAL KESELURUHAN		8.55 1	6.42 8	75 %	6.71 5	5.48 7	81 %	T 1836 (21 %)

e. 10 Kasus tertinggi tahun 2018

NO	KASUS	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1635	1511	92 %	1582	1411	89 %	T 53 (3 %)
2	CURANMOR	972	459	47 %	466	258	55 %	T 506 (52 %)
3	CURAT	680	379	55 %	572	384	67 %	T 108 (15 %)
4	ANIRAT	437	324	74 %	296	209	70 %	T 141 (32 %)
5	CURAS	99	51	51 %	76	46	60 %	T 23 (23 %)
JUMLAH		3.283	2.724	82 %	2.992	2.308	77 %	T 291 (8 %)

NO	SAT WIL	TAHUN 2017						TAHUN 2018					
		JML LAKA	SELESAI	KORBAN			RUMAT	JML LAKA	SELESAI	KORBAN			RUMAT
				M D	L B	L R				M D	L B	L R	
1	KUKAR	171	147	20	116	160	Rp 2,197,000,000	117	118	20	53	157	Rp 2,059,200,000
2	SAMARINDA	171	118	41	49	125	Rp 615,400,000	143	231	53	85	76	Rp 575,650,000
3	BALIKPAPAN	112	112	4	53	89	Rp 126,100,000	124	106	3	39	126	Rp 1,276,400,000
4	PASER	107	73	52	6	91	Rp 456,800,000	68	93	33	9	94	Rp 483,400,000
5	KUBAR	86	88	14	22	49	Rp 559,300,000	41	39	17	13	46	Rp 272,200,000
6	KUTIM	71	73	13	31	19	Rp 420,500,000	39	42	19	29	10	Rp 346,300,000
7	BONTANG	58	70	15	9	52	Rp 370,400,000	62	64	9	10	70	Rp 998,500,000
8	BERAU	47	34	29	19	37	Rp 225,100,000	80	51	38	15	54	Rp 263,520,000
9	PPU	41	43	21	20	28	Rp 134,250,000	49	50	23	28	33	Rp 358,050,000
JML		8648	7588	2095	3250	650	Rp 5,104,850,000	723	794	215	281	666	Rp 6,633,220,000

f. Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Persatwil sebagai berikut :

NO	SATWIL	TAHUN 2017				TAHUN 2018			
		TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA	TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA
1	SAMAR	17,1	24,73	41,9	Rp	18,5	27,47	46,0	Rp

	INDA	85	3	18	1,957,945,000	65	8	43	2,175,696,000
2	BALIK PAPAN	12,682	27,190	39,872	Rp 1,408,206,000	11,638	20,361	31,999	Rp 1,450,150,000
3	KUKAR	11,074	17,167	28,241	Rp 1,338,333,000	13,037	15,626	28,663	Rp 1,152,702,000
4	KUTIM	10,398	13,981	24,379	Rp 914,689,000	15,779	23,406	39,185	Rp 1,099,303,000
5	PASER	5,176	9,769	14,945	Rp 4,550,400,000	7,046	8,556	15,602	Rp 4,910,650,000
6	BERAU	5,000	11,858	16,858	Rp 14,350,000	6,133	18,099	24,232	Rp 11,380,000
7	BONTANG	4,644	4,313	8,957	Rp 384,850,000	9,293	8,428	17,721	Rp 447,150,000
8	PPU	4,180	9,692	13,872	Rp 378,004,800	4,184	10,422	14,606	Rp 59,365,000
9	KUBAR	1,651	15,809	17,460	Rp 155,314,000	2,286	11,269	13,555	Rp 169,127,000
10	PJR DITLANTAS	5,530	3,100	8,630	Rp -	6,970	2,910	9,880	Rp 81,725,000
	JUMLAH	77,520	137,612	215,132	Rp 3,887,288,870	94,931	146,555	241,486	Rp 11,557,248,000

Berdasarkan data-data kriminalitas Tahun 2018, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yakni:

- a. Jumlah tindak pidana pada tahun 2018 sebanyak **6.715** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak **8.551** kasus, maka mengalami penurunan sebanyak **1.836** kasus (21 %);

- b. Penyelesaian tindak pidana tahun 2018 sebanyak **5.487** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak **6.428** kasus, maka mengalami penurunan sebanyak **941** kasus (14 %);
- c. Presentase Penyelesaian tindak pidana pada tahun 2018 sebesar **81 %**, sedangkan pada tahun 2017 sebesar **75 %** sehingga mengalami kenaikan sebanyak **6 %**;
- d. Laka lantas pada tahun 2018 sebanyak **723 kasus** (MD 215 org, LB 281 org, LR 666 org, Rumat Rp 6,633,220,000), apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak **864 kasus** (MD 209 org, LB 325 org, LR 650 org, Rumat Rp 5,104,850,000), maka mengalami penurunan sebanyak **141** kasus (16 %);
- e. Pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2018 sebanyak **241.486 gar** (tilang 94.931, teguran 146.555 dan Rumat Rp 11,557,248,000), apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak **215.132 gar** (tilang 77.520, teguran 137.612 dan Rumat Rp 3,887,288,870), maka mengalami kenaikan sebanyak **26.354** (12 %);
- f. Resiko terkena tindak pidana per 100.000 penduduk pada tahun 2018 sebesar **164 orang**, sedangkan pada tahun 2017 sebesar **209 orang**, maka resiko terkena tindak pidana mengalami penurunan sebesar **45 orang**.

- g. Selang waktu / crime clock, bahwa pada tahun 2018 rata-rata setiap 1 jam, 18 menit, 60 detik terjadi 1 (satu) tindak pidana & bahwa pada tahun 2017 rata-rata setiap 1 jam, 1 menit, 12 detik terjadi 1 (satu) tindak pidana, sehingga mengalami perlambatan waktu 17 menit 48 detik.

3. Data Tindak Pidana (Kriminalitas) di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2019

- a. Data laporan gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2019 sebagai berikut:

NO	BAB XIVURAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JML
V. KEJAHATANKONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	2	0	2	0	1	2	3	2	0	0	0	12
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
08	PEMALSUAN SURAT	6	3	2	1	0	1	0	0	0	17	0	0	0	30

09	PERJINAHAN	4	8	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	15
10	PERKOSAAN	4	0	6	0	1	3	3	1	0	0	0	0	0	18
11	PERMAINAN JUDI	19	7	6	4	4	11	3	1	6	8	0	0	0	69
12	PENGHINAAN	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	5
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	98	58	0	4	0	9	6	6	4	0	0	0	0	185
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	53	50	56	17	10	2	23	11	5	11	0	1	0	239
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	143	117	9	19	17	26	23	2	16	6	0	3	0	381
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	15	22	2	5	8	3	1	2	0	2	0	0	0	60
23	PERAS/ANCAM	17	10	5	3	0	0	4	0	0	2	0	0	0	41
24	PENGGELAPAN	82	39	12	3	9	2	15	3	5	36	0	1	0	207
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	42	35	3	1	3	2	5	2	4	30	0	0	3	130
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	3	6	6	0	0	1	1	3	0	4	0	0	0	24
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	6	0	12
156	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	KEJ. NARKOTIKA (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	TERORISME (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	KEJAHATAN PASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MODAL														
169	CURANMOR R2	167	100	36	16	33	14	15	2	16	10	0	0	0	409
170	CURANMOR R4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
171	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	7
175	PENGEROYOKAN	42	30	0	3	7	5	5	5	1	1	0	0	0	99
176	SAJAM	38	30	8	2	11	0	5	2	9	7	0	0	0	112
177	UANG PALSU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
178	PEMBUNUHAN	4	2	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	12
179	PORNOGRAFI	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3

N O	BAB XVURAIAN	S M D	BP P	KK R	BT G	PS R	BR U	KT M	KB R	PP U	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
180	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
181	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	KENA KALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	LA KA KERJA	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
191	LA KA LA UT/AIR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
192	LA KA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	MIRAS	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	27

				4											
195	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	THDP A SAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AANDI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	LAKA LANTAS	1 0 9	8 8	1 0 3	4 0	7 1	5 7	27	3 4	4 3	0	0	0	0	57 2
206	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	8	3	0	0	0	3	1	1	4	0	0	0	25
211	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
214	CABUL	1 4	3 6	0	0	7	0	21	0	0	2	0	0	0	80
215	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	9 3 7	6 5 1	2 8 6	1 1 9	1 8 7	1 4 0	16 9	8 3	1 1 6	1 5 2	0	1 3	3	28 56
W. KEJAHATAN TRANS NASIONAL															
01	NARKOTIKA	3 2 3	3 7 1	2 1 9	6 3	8 6	1 0 4	13 4	8 8	7 9	0	22 9	4	0	17 00
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	KEJDUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	SENPI / ARM SMUGLING														
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ. TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	324	371	220	63	86	104	134	88	79	0	229	4	0	1702

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI T KR I M S U S	JML
X. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
01	KORUPSI	2	1	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	12
02	ILLEGAL LOGGING	0	2	4	0	4	9	11	7	6	0	0	7	2	52
03	ILLEGAL FISHING	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	8
04	ILLEGAL MINING	7	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	9	23
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	BBM ILLEGAL	5	4	7	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	28
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ITE	9	3	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	7	24
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
11	P. KONSUMEN	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PERTAMBANGAN	0	0	8	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	15
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	0	1	0	0	6	11	0	2	0	0	0	8	28
	JUMLAH	26	10	29	0	5	31	33	10	12	0	0	10	35	201
Y. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI															
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)															
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PEIACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	SEKSUAL YG SETARA														
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBAN GSAAN,ETNIS,BUDA YA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	B TG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI T KR I M S U S	JML
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	28	31	4	2	1	0	2	0	4	7	0	0	0	79
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	45	6	38	6	11	33	1	21	21	5	0	0	0	187
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	73	37	42	8	12	33	3	21	25	12	0	0	0	266
Å. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA															
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TRO TOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPATHIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ä. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	10	25	37	0	11	5	13	0	5	5	0	0	111
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM (MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)														
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN, MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MA MASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	<i>DI T POL AIR</i>	DI TK RIMSUS	JML
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MENGEMBARA KE MANA-MANA														
3 3	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 6	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK- ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 7	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 8	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHAN NYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEM PERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG- UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG/ ORG SEDANG BERBUAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	KEJAHATAN														
4 2	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA PABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 7	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 8	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 9	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 0	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TTG KAM UMUM BG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	ORG.BRG DAN KES														
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	R ES K R I M U M	DI TN AR KO BA	<i>DI T PO L AI R</i>	DI T K R I M S U S	JML
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/P EKARANGAN	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	6
59	JABATAN	0	11	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	JUMLAH	10	36	39	0	11	5	16	0	5	10	0	6	0	138
Ö. GANGGUAN THDP. ORANG															
1	PENEMUAN MAYAT	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TEMU BAYI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
GANGGUAN THDP. BARANG															
1	KEBAKARAN	4	5	3	0	1	2	0	12	0	3	0	0	0	84
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	9	3	0	1	2	0	12	0	3	0	0	0	84
AA. GANGGUAN THDPHEWAN															
1	MEMBUNUH HEWAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BB. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2019

sebagai berikut:

NO	BAB XVIURAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RE SK RI MU M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JML
CC. KEJAHATAN KONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	59	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	61
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	7
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	4	2	2	1	0	0	0	0	0	19	0	0	1	29
09	PERJINAHAN	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
10	PERKOSAAN	3	0	6	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	17
11	PERMAINAN JUDI	19	8	6	4	4	10	3	1	7	0	0	0	0	62
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	1	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	66	34	0	3	0	8	4	11	4	0	0	0	0	130
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	57	104	56	17	10	1	27	10	5	5	0	1	0	292
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	135	82	8	19	17	28	22	5	17	9	0	3	0	345
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	10	12	2	5	8	2	1	2	0	2	0	0	0	44

2															
23	PERAS/ANCAM	15	6	5	3	0	1	4	0	0	1	0	0	0	35
24	PENGGELAPAN	43	28	11	3	9	1	13	4	7	20	0	1	0	140
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	27	21	3	1	2	4	1	1	3	48	0	0	1	112
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	0	1	5	0	0	3	1	2	3	3	0	0	0	18
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	10	4	1	0	0	0	3	0	2	0	0	6	0	26
92	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	CURANMOR R2	123	25	36	11	25	9	13	2	18	10	0	0	0	272
106	CURANMOR R4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
107	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	CURAS SAJAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	8
111	PENGEROYOKAN	27	18	0	3	7	5	2	3	1	0	0	0	0	66
112	SAJAM	38	21	8	2	11	1	5	2	3	5	0	0	0	96
113	UANG PALSU	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
114	PEMBUNUHAN	2	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	9
115	PORNOGRAFI		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
116	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

121	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	LA KA KERJA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
127	LA KA LAUT/AIR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
128	LA KA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	MIRAS	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	26
131	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AANDI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	LA KA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	LA KA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	LA KA LANTAS	127	91	95	40	64	66	27	39	44	0	0	0	0	593
142	LA KA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	LA KA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	KEJKONVENSIONAL LA INNYA	2	5	3	0	0	0	3	0	1	4	0	0	0	18
147	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
150	CABUL	16	12	0	0	6	0	17	0	0	1	0	0	0	52
151	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	794	478	275	113	170	149	160	84	116	133	0	13	2	2487

DD. KEJAHATAN TRANS NASIONAL															
01	NARKOTIKA	327	290	219	63	86	94	100	81	66	0	183	4	0	1513
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
06	KEJADUAN MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ. TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	328	290	220	63	86	94	100	81	66	0	183	4	3	1518
EE. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
01	KORUPSI	3	1	2	0	1	2	1	1	1	0	0	0	4	16
02	ILLEGAL LOGGING	0	0	4	0	4	10	6	6	0	0	0	7	1	47
03	ILLEGAL FISHING	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	4
04	ILLEGAL MINING	2	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	10
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
07	BBM ILLEGAL	2	3	7	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	19
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ITE	3	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	16
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
11	P. KONSUMEN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	PERTAMBANGAN	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	13
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LA INNYA	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	6	13
	JUMLAH	10	8	26	0	5	29	15	9	10	0	0	10	29	151
FF. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI															
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LA INNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GG. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)															
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LA IN SECARA SEWENANG-WENANG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SECARA PAKSA,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA														
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBAN GSAAN,ETNIS,BUDA YA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DIM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	30	9	4	2	1	1	2	0	4	2	0	0	0	55
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	39	1	3	5	1	3	4	1	2	2	0	0	0	165
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	69	10	4	7	1	3	6	1	2	4	0	0	0	220

NO	BAB VII IURAIAN	SM D	BP P	KK R	BT G	PS R	BR U	KT M	KB R	PP U	RE SK RI MU M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
	HH. PELANGGARAN HUKUM NON.PIDANA														
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPAT HIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERA (SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT, CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	8	15	37	0	11	7	13	0	7	1	0	0	0	99
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENA KALAN THDP ORANG A TAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ ANAK- ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ANAK TSB														
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM (MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN, MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGENBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 5	TANPA IJIN POLRI(PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PA WAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 6	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK- ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 7	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 8	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHAN NYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA ST LH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEM PERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	TDK DA TANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG- UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN														
4 4	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLA MPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CA CAT, P INCANG, LUKA, HA MIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEA DAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESA KTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBUKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BA HAYA A PABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 7	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAM I DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 8	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAM I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 9	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 0	MEMBUKA RA HASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 3	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 4	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 5	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 6	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 7	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58	TTG TANAH/TANAMAN/ PEKARANGAN	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	7
59	JABATAN	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	JUMLAH	8	30	39	0	11	7	15	0	7	5	0	6	0	128

NO	BAB XVIIIURAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KT M	KB R	PP U	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
JJ. GANGGUAN THDP. ORANG															
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBTHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
KK. GANGGUAN THDP. BARANG															
1	KEBAKARAN	49	0	1	0	12	0	11	0	3	0	0	0	0	76
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	49	0	1	0	12	0	11	0	3	0	0	0	0	76
LL. GANGGUAN THDPHEWAN															
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MM.BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. Rekapitulasi gangguan kamtibmas dan penyelesaian berdasarkan penggolongan jenis kejahatan sebagai berikut:

N O	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1.	KEJAHATAN KONVENSIONAL	4950	3940	79 %	3350	2914	86 %	T 1600 (32 %)
2	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	1587	1412	88 %	1702	1518	89 %	N 115 (7 %)
3.	KEJ. KEKAYAAN NEGARA	178	135	75 %	201	151	75 %	N 23 (12 %)
4.	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	0	0	0	0	0	0	0
J U M L A H		6.715	5.487	81 %	5.253	4.583	87 %	T 1462 (21 %)

d. Gangguan kamtibmas dan penyelesaian persatwil sebagai berikut:

N O	KESATUAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	DITRESNAR KOBAB	216	170	78 %	229	183	79 %	N 13 (6 %)
2	DITRESKRIMUM	300	268	89 %	174	142	81 %	T 126 (42 %)
3	DIT POLAIR	25	25	100 %	33	33	100 %	N 8 (32 %)
4	DITRESKRIMSUS	62	33	53 %	38	34	89 %	T 24 (38 %)
J U M L A H		603	496	82 %	474	392	82 %	T 129 (21 %)

1	RESTA SMDA	1807	1495	82 %	1420	1258	88 %	T 387 (21 %)
2	RES BPP	1976	1451	73 %	1111	816	73 %	T 865 (43 %)
3	RES KUKAR	606	580	95 %	619	603	97 %	N 13 (2 %)
4	RES BERAU	399	300	75 %	314	313	99 %	T 85 (21 %)
5	RES KUTIM	345	278	80 %	368	307	83 %	N 23 (6 %)
6	RES PASER	303	271	89 %	314	297	94 %	N 11 (3 %)
7	RES BTG	253	234	92 %	190	183	96 %	T 63 (24 %)
8	RES PPU	220	202	91 %	241	227	94 %	N 21 (9 %)
9	RES KUBAR	203	180	88 %	202	187	92 %	T 1 (1 %)
JUMLAH		6112	4991	81 %	4779	4191	87 %	T 1333 (21 %)
TOTAL KESELURUHAN		6.715	5.487	81 %	5253	4583	87 %	T 1462 (21 %)

e. 5 Kasus tertinggi tahun 2019

NO	KASUS	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TREN D
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1582	1411	89 %	1700	1513	89 %	N 118 (7 %)
2	CURAT	572	384	67 %	381	345	90 %	T 191 (33 %)
3	CURANMOR	466	258	55 %	414	276	66 %	T 52 (11 %)
4	ANIRAT	296	209	70 %	185	130	70 %	T 111 (37 %)
5	CURAS	76	46	60 %	60	44	73 %	T 16 (21 %)

6	CURBIS	76	276	363 %	239	292	122 %	N 163 (214 %)
7	ANIRING	148	122	82 %	111	99	89 %	T 37 (25 %)
8	PENGGELAPAN	331	220	66 %	207	140	67 %	T 124 (37 %)
9	PENIPUAN	298	186	62 %	130	112	86 %	T 168 (56 %)
10	JUDI	97	105	108 %	69	62	89 %	T 28 (28 %)
JUMLAH		3.942	3.217	81 %	3.496	3.013	86 %	T 446 (11.3 %)

f. Rekapitulasi laka Lantas Persatwil sebagai berikut:

NO	SATWIL	TAHUN 2018						TAHUN 2019					
		JMLAKA	SELESAI	KORBAN			RUMAT	JMLAKA	SELESAI	KORBAN			RUMAT
				M	B	L				M	B	L	
1	SAMARINDA	143	231	53	85	76	Rp 575,650,000	109	119	47	49	68	Rp 338,600,000
2	BALIKPAPAN	124	106	33	39	126	Rp 1,276,400,000	88	91	18	34	68	Rp 192,200,000
3	KUKAR	117	118	20	53	157	Rp 2,059,200,000	103	95	11	72	82	Rp 829,350,000
4	BERAU	80	51	38	15	54	Rp 263,520,000	55	66	18	27	36	Rp 109,300,000
5	PASER	68	93	33	9	94	Rp 483,400,000	71	64	28	7	78	Rp 290,900,000
6	BONTANG	62	64	9	10	70	Rp 998,500,000	40	40	21	5	36	Rp 223,000,000
7	KUBAR	41	39	17	13	46	Rp 272,200,000	34	37	19	14	27	Rp 122,000,000

							0,000						000
8	PPU	49	50	23	28	33	Rp 358,05 0,000	43	44	22	12	23	Rp 206,000, 000
9	KUTIM	39	42	19	29	10	Rp 346,30 0,000	27	27	16	12	14	Rp 188,000, 000
JML		723	794	215	281	666	Rp 6,633, 220,00 0	570	583	190	232	433	Rp 2,499,3 50,000

g. Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Persatwil sebagai berikut:

NO	SATWIL	TAHUN 2018				TAHUN 2019			
		TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA	TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA
1	PJR DITLAN TAS	6,9 70	2,91 0	9,8 80	Rp 81,725,00 0	6,01 1	2,118	8,12 9	Rp 1,053,50 0,000
2	SAMAR INDA	18, 565	27,4 78	46, 043	Rp 2,175,696, 000	23,5 00	28,24 9	51,7 49	Rp 2,174,47 5,000
3	KUTIM	15, 779	23,4 06	39, 185	Rp 1,099,303, 000	11,4 39	25,20 0	36,6 39	Rp 1,391,42 9,000
4	KUKAR	13, 037	15,6 26	28, 663	Rp 1,152,702, 000	15,9 81	17,68 3	33,6 64	Rp 2,023,70 2,000
5	BALIKP APAN	11, 638	20,3 61	31, 999	Rp 1,450,150, 000	11,6 05	28,00 1	39,6 06	Rp 1,088,15 5,000
6	BONTA NG	9,2 93	8,42 8	17, 721	Rp 447,150,0 00	7,53 3	18,37 6	25,9 09	Rp 231,975, 000
7	PASER	7,0 46	8,55 6	15, 602	Rp 4,910,650, 000	5,50 4	15,84 6	21,3 50	Rp 701,600, 000
8	BERAU	6,1 33	18,0 99	24, 232	Rp 11,380,00 0	7,61 9	19,99 7	27,6 16	Rp 800,580, 000
9	PPU	4,1 84	10,4 22	14, 606	Rp 59,365,00 0	3,74 5	15,53 6	19,2 81	Rp 162,140, 000

10	KUBAR	2,286	11,269	13,555	Rp 169,127,000	3,152	14,693	17,845	Rp 310,826,000
JUMLAH		94,931	146,555	241,486	Rp 11,557,248,000	96,089	185,699	281,788	Rp 9,938,382,000

Berdasarkan data-data kriminalitas pada tahun 2019 di atas, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan, yakni:

- a. Jumlah tindak pidana pada tahun 2019 sebanyak **5.253** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak **6.715** kasus, maka mengalami **penurunan** sebanyak **1.462** kasus (21 %);
- b. Penyelesaian tindak pidana tahun 2019 sebanyak **4.583** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak **5.487** kasus, maka mengalami **penurunan** sebanyak **904** kasus (16 %);
- c. Presentase Penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019 sebesar **87 %**, sedangkan pada tahun 2018 sebesar **81 %** sehingga mengalami **kenaikan** sebanyak **6 %**;
- d. Laka lantas pada tahun 2019 sebanyak **570 kasus** (MD 190 org, LB 232 org, LR 432 org, Rumat Rp 2,499,350,000), apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak **723 kasus** (MD 215 org, LB 281 org, LR 666 org, Rumat Rp 6,633,220,000), maka mengalami penurunan sebanyak **153** kasus (21 %);

- e. Pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2019 sebanyak **281.788 gar** (tilang 96.089, teguran 185.699 dan Rumat Rp 9,938,382,000), apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak **241.486 gar** (tilang 94.931, teguran 146.555 dan Rumat Rp 11,557,248,000), maka mengalami **kenaikan** sebanyak **40.302** (16 %);
- f. Resiko terkena tindak pidana per 100.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar **128 orang**, sedangkan pada tahun 2018 sebesar **164 orang**, maka resiko terkena tindak pidana mengalami **penurunan** sebesar **36 orang**.
- g. Selang waktu / crime clock, bahwa pada tahun 2019 rata-rata setiap 1 jam, 26 menit, 24 detik terjadi 1 (satu) tindak pidana & bahwa pada tahun 2018 rata-rata setiap 1 jam, 18 menit, 60 detik terjadi 1 (satu) tindak pidana, sehingga mengalami **perlambatan** waktu 8 menit 36 detik.

4. Data Tindak Pidana (Kriminalitas) di Wilayah Kalimantan Timur

Tahun 2020

a. Data laporan gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun

2020 sebagai berikut:

N O	BAB XIXURAIAN	S M D	B P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	RE SK R I M U M	DI TN AR KO BA	DI T P O L A I R	DI TK R I M SU S	J M L
NN. KEJAHATANKONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	44	4	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	70
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	4	2	3	0	0	0	2	1	0	12	0	0	0	24
09	PERJINAHAN	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5
10	PERKOSAAN	0	0	1	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	41
11	PERMAINAN JUDI	5	5	0	1	1	8	3	0	7	13	0	0	0	43
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	10
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	37	46	8	9	0	16	7	8	1	0	0	0	0	132
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	48	54	19	7	7	2	20	16	6	6	0	6	0	191
20	PENCURIAN DG	8	1	2	4	1	58	13	9	1	2	0	1	0	38

0	PEMBERATAN	0	0	1	7	9				7			0		2
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	14	17	4	9	0	1	2	1	0	0	0	0	0	48
23	PERAS/ANCAM	4	8	8	4	2	3	4	5	5	2	0	0	0	45
24	PENGGELAPAN	82	36	19	14	10	8	21	10	6	16	0	0	0	222
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	27	20	4	14	4	2	6	2	1	25	0	0	0	105
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	2	4	4	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	15
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
219	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4
222	KEJ. NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	CURANMOR R2	85	81	18	4	31	24	7	2	5	12	0	0	0	269
233	CURANMOR R4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
234	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	CURAS SAJAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
236	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	7
238	PENGEROYOKAN	20	28	4	5	3	0	6	1	2	0	0	0	0	69
239	SAJAM	37	24	4	4	10	0	4	6	3	4	0	0	0	96
240	UANG PALSU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
241	PEMBUNUHAN	2	2	2	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	12
242	PORNOGRAFI	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3

N O	BAB XXURAIAN	S M D	B P	KK R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JML
243	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	PROD & DA GANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	KENA KALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	LA KA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	LA KA LA UT/AIR	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
255	LA KA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
257	MIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLN YA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	THDP KEWJ BAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AANDI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
263	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	LA KA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	LA KA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	LA KA LANTAS	9 6	4 7	7 7	5 6	4 1	5 5	23	2 2	3 1	0	0	0	0	448
269	LA KA LA UT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	LA KA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

273	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	8	1	2	4	0	9	1	0	5	0	0	0	35
274	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	CABUL	21	23	0	0	2	0	36	0	0	6	0	0	0	88
278	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
281	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	625	522	203	179	142	251	173	91	85	107	0	19	0	2397
OO. KEJAHATAN TRANS NASIONAL															
01	NARKOTIKA	197	233	175	71	109	90	147	76	83	0	234	4	0	1419
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
06	KEJ DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	198	234	178	71	109	90	147	76	83	0	234	4	6	1430

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T P OL AI R	DI T KR I M S U S	JML
PP. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
01	KORUPSI	0	0	2	0	2	2	1	2	0	0	0	0	2	11
02	ILLEGAL LOGGING	1	0	0	0	2	5	8	5	1	0	0	6	7	35
03	ILLEGAL FISHING	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
04	ILLEGAL MINING	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	11
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

07	BBM ILLEGAL	0	2	3	0	1	19	2	4	0	0	0	3	0	34
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	4
09	ITE	1	4	2	0	0	0	2	3	1	0	0	0	13	26
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
11	P. KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
15	PERTAMBANGAN	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	10	14
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP .KEKAYAAN NEGARA LAINNYA	0	1	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	2	11
	JUMLAH	4	8	13	0	5	32	22	15	5	0	0	10	55	169
	QQ. KEJAHATANBERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP . KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RR. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRANATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KE BEBASAN FISIK LA IN SECARA SEWENANG-WENANG YG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL														
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DIM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBAN GSAAN,ETNIS,BUDA YA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DITNARKOBA	DITPOLAIR	DITKRIMSUS	JML
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	14	5	7	9	4	4	3	4	3	8	0	0	0	61
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	21	2	36	22	14	1	3	23	14	2	0	0	0	138
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	35	7	43	31	18	5	6	27	17	10	0	0	0	199
SS. PELANGGARAN HUKUM NONPIDANA															
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPATHIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TT.PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAN RINGAN	17	6	14	9	16	0	16	2	1	1	0	0	82
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENAKALAN THDP ORANG A TAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM (MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN, MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG A TAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MA MASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N O	URAIAN	S M D	B P P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	R E S K R I M U M	D I T N A R K O B A	<i>D I T P O L R I A I R</i>	D I T K R I M S U S	J M L
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN/ TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWADI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 8	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHANNYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEM PERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA																	
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	<i>DI T</i> <i>PO L</i> <i>AI R</i>	DI T K R I M S U S	JML			
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	TTG KESUSILAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
58	TTG TANAH/TANAMAN/PEKARANGAN	2	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	
59	JABATAN	2	9	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	12	
	JUMLAH	22	15	21	9	16	0	16	2	1	4	0	12	0	118			
	UU. GANGGUAN THDP. ORANG																	
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	TEMU BAYI	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	3	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	14
GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	27	2	2	1	4	1	4	0	0	0	0	0	41
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	27	2	2	1	4	1	4	0	0	0	0	0	41
VV. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WW. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2020

sebagai berikut:

NO	BAB XXI URAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RE SK RI M UM	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JML
XX. KEJAHATAN KONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	42	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	55
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06	SUMPAAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
08	PEMALSUAN SURAT	1	1	2	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	18
09	PERJINAHAN	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3
10	PERKOSAAN	0	0	1	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	39
11	PERMAINAN JUDI	4	4		1	1	6	3	0	7	5	0	0	0	31
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	1	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	33	33	8	5	0	14	3	6	0	0	0	0	0	102
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	44	81	19	7	7	2	25	16	6	6	0	6	0	219
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	91	98	21	43	16	44	7	5	18	2	0	3	0	348
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	12	11	4	6		1	1	1	0	0	0	0	0	36
23	PERAS/ANCAM	6	6	8	3	2	1	4	3	4	3	0	0	0	40
24	PENGGELAPAN	71	30	19	10	10	9	11	8	3	19	0	0	0	190
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	16	17	3	6	4	0	5	2	1	22	0	0	0	76
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	2	4	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	13
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	6	9	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	21
155	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	PENYALAHGUNAAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	5
158	KEJ. NARKOTIKA (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	TERORISME (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM. NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

165	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	CURANMOR R2	69	83	18	4	14	15	5	3	3	15	0	0	0	229
169	CURANMOR R4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
170	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	CURAS SAJAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
172	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5
174	PENGEROYOKAN	18	14	3	4	2	0	9	1	4	0	0	0	0	55
175	SAJAM	26	19	4	4	10	0	2	4	10	2	0	0	0	81
176	UANG PALSU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
177	PEMBUNUHAN	2	6	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	15
178	PORNOGRAFI	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
179	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
180	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	LAKA KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	LAKA LAUT/AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	LAKA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ABORSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
193	MIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AAN DI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
199	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

200	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	LAKA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	LAKA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	LAKA LANTAS	11 4	56	8 6	3 9	3 1	3 4	22	2 0	2 9	0	0	0	0	43 1
205	LAKA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	LAKA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	5	3	1	0	4	0	5	2	1	1	0	0	0	22
210	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	CABUL	19	8	1	0	2	0	30	0	0	4	0	0	0	64
214	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	59 2	48 8	20 8	13 4	10 7	18 9	14 3	7 8	8 6	9 9	0	1 2	0	21 36
	YY. KEJAHATAN TRANS NASIONAL														
01	NARKOTIKA	21 4	22 6	17 5	7 1	10 9	6 2	10 5	7 2	6 8	0	16 9	4	0	12 75
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	KEJ. DUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ. TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	21 5	22 6	17 8	7 1	10 9	6 2	10 5	7 2	6 8	0	16 9	4	1	12 80
	ZZ. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA														
01	KORUPSI	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	6	12
02	ILLEGAL LOGGING	1	0	0	0	2	4	10	7	1	0	0	6	7	38

03	ILLEGALFISHING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
04	ILLEGALMINING	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	11
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07	BBM ILLEGAL	0	0	3	0	1	18	3	3	0	0	0	3	0	31
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
09	ITE	2	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	13	21
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11	P. KONSUMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
15	PERTAMBANGAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LA INNYA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	4	3	7	0	5	27	16	15	7	0	0	10	45	139
	ÅÅ. KEJAHATANBERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WA PRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASIS WA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	KONTINJENSI LAINNYA														
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÄÄ. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBAN-GSAAN,ETNIS,BUDAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DLM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	12	0	7	6	4	2	2	1	0	4	0	0	0	38
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	18	1	3	6	1	7	1	2	1	2	2	3	0	110
15	PELANGGARAN HAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	LAINNYA														
	JUMLAH	30	1	4	2	1	3	4	2	0	4	0	0	0	14
				3	3	6			4						8

N O	BA B XXIIIURAIAN	S M D	B P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	RE SK R I M U M	D I T N A R K O B A	D I T P O L A I R	D I T K R I M S U S	J M L
	ÖÖ. PELANGGARAN HUKUM NONPIDANA														
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPATHIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AAA. PELANGGARAN HUKUM PIDANA														
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2														
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	15	1	14	1	15	0	16	2	0	0	0	0	64
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENA KALAN THDP ORANG A TAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYU SAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG A TAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECEL AKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MERUSAK KESEHATAN														
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERI RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWADI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHAN NYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STlh 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEMPERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40	TDK DATANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA A PABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	MELAWAN HAK													
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	TTG ORG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58	TTG TANAH/TANAMAN/P EKARANGAN	1	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9
59	JABATAN	1	8	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13
60	PELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	9	21	1	15	0	16	2	0	6	0	0	88

NO	BAB XXIIIURAIAN	SMD	BP	KKR	BG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JML
	BBB. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	CCC. GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	27	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	37
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	BARANG LAINNYA													
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2	0	1	0	4	0	5	0	0	0	0	0	37
DDD. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EEE. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c. Rekapitulasi gangguan kamtibmas dan penyelesaian berdasarkan penggolongan jenis kejahatan sebagai berikut :

N O	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1.	KEJAHATAN KONVENSIIONAL	334	291	86 %	276	241	87 %	T 581 (17 %)
2	KEJAHATAN TRANS NASIONAL	170	151	89 %	143	128	89 %	T 272 (15 %)
3.	KEJ. KEKAYAAN NEGARA	201	151	75 %	169	139	82 %	T 32 (15 %)
4.	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	1	1	100 %	0	0	0	0
	J U M L A H	5.2	4.5	87 %	4.3	3.8	87 %	T 885 (16 %)
		53	83		68	36		

d. Gangguan kamtibmas dan penyelesaian persatwil sebagai berikut:

N O	KESATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	DITRESNA RKOBA	229	183	79 %	234	169	72 %	N 5 (2 %)

2	DITRESKRIMUM	174	142	81 %	122	109	89 %	T 52 (29 %)
3	DITPOLAIR	33	33	100 %	45	26	57 %	N 12 (36 %)
4	DITRESKRIMSUS	38	34	89 %	61	46	75 %	N 23 (60 %)
JUMLAH		474	392	82 %	462	350	75 %	T 12 (2 %)
1	RESTASMDA	1420	1258	88 %	911	886	97 %	T 509 (35 %)
2	RES BPP	1111	816	73 %	791	727	91 %	T 320 (28 %)
3	RES KUKAR	619	603	97 %	460	458	99 %	T 159 (25 %)
4	RES BERAU	314	313	99 %	379	281	74 %	N 65 (20 %)
5	RES KUTIM	368	307	83 %	368	289	78 %	TTP
6	RES PASER	314	297	94 %	304	264	86 %	T 10 (3 %)
7	RES BTG	190	183	96 %	291	229	78 %	N 101 (53 %)
8	RES PPU	241	227	94 %	191	161	84 %	T 50 (20 %)
9	RES KUBAR	202	187	92 %	211	191	90 %	N 9 (4 %)
JUMLAH		4.779	4191	87 %		3.486	89 %	T 873 (18 %)
TOTAL KESELURUHAN		5.253	4583	87 %	4.368	3.836	87 %	T 885 (16 %)

e. 5 Kasus tertinggi tahun 2020

NO	KASUS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1700	1513	89 %	1419	1275	89 %	T 281 (16 %)
2	CURANMOR	414	276	66 %	274	234	85 %	T 140 (33 %)
3	CURAT	381	345	90 %	382	348	91 %	N 1 (0.2 %)
4	ANIRAT	185	130	70 %	132	102	77 %	T 53 (28 %)
5	CURAS	60	44	73 %	48	36	75 %	T 12 (20 %)
JUMLAH		2.740	2.308	84 %	2.255	1995	88 %	T 485 (17 %)

f. Rekapitulasi laka Lantas Persatwil sebagai berikut:

NO	SAT WIL	TAHUN 2019						TAHUN 2020					
		JML LAKA	SELESAI	KORBAN			RUMAH T	JML LAKA	SELESAI	KORBAN			RUMAH T
				M D	L B	L R				M D	L B	L R	
1	SAMARINDA	109	119	47	49	68	Rp 338,600,000	96	114	47	36	64	Rp 247,500,000
2	BALIKPAPAN	88	91	18	34	68	Rp 192,200,000	47	56	37	5	26	Rp 170,000,000
3	KUKAR	103	95	1	72	82	Rp 829,350,000	77	86	4	57	73	Rp 512,900,000
4	BERAU	55	66	18	27	36	Rp 109,300,000	55	34	33	15	35	Rp 276,300,000
5	PASER	71	64	28	7	78	Rp 290,900,000	41	31	31	4	31	Rp 71,800,000

6	BONTANG	40	40	21	5	36	Rp 223,000,000	56	39	20	39	33	Rp 663,700,000
7	KUBAR	34	37	19	14	27	Rp 122,000,000	22	20	13	5	20	Rp 93,000,000
8	PPU	43	44	22	12	23	Rp 206,000,000	31	29	20	12	13	Rp 152,000,000
9	KUTIM	27	27	16	12	14	Rp 188,000,000	23	22	9	22	28	Rp 601,400,000
JML		570	583	190	232	432	Rp 2,499,350,000	448	431	214	195	323	Rp 2,788,600,000

g. Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Persatwil sebagai berikut:

NO	SATWIL	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		TILANG	TEGURAN	JML	DENDA	TILANG	TEGURAN	JML	DENDA
1	PJR DITLANTAS	6,011	2,118	8,129	Rp 1,053,500,000	2,692	3,581	6,273	Rp 470,400,000
2	SAMARINDA	23,500	28,249	51,749	Rp 2,174,475,000	12,755	17,075	29,830	Rp 2,270,700,000
3	KUKAR	15,981	17,683	33,664	Rp 2,023,702,000	4,218	11,020	15,238	Rp 571,800,000
4	KUTIM	11,439	25,200	36,639	Rp 1,391,429,000	2,357	9,816	12,173	Rp 396,126,000
5	BALIKPAPAN	11,605	28,001	39,606	Rp 1,088,155,000	7,234	8,649	15,883	Rp 800,062,500
6	BONTANG	7,533	18,376	25,909	Rp 231,975,000	1,601	12,251	13,852	Rp 52,424,000
7	BERAU	7,619	19,997	27,616	Rp 800,580,000	2,680	12,743	15,423	Rp 307,264,000
8	PASER	5,504	15,846	21,350	Rp 701,600,	766	11,817	12,583	Rp 131,450,

					000				000
9	PPU	3,7 45	15,5 36	19, 281	Rp 162,140, 000	1,78 2	8,429	10,2 11	Rp 24,300,0 00
1 0	KUBAR	3,1 52	14,6 93	17, 845	Rp 310,826, 000	1,23 8	6,035	7,27 3	Rp 146,516, 000
JUMLAH		96, 08 9	185, 699	28 1,7 88	Rp 9,938,3 82,000	37, 323	101, 416	138 ,73 9	Rp 5,171,0 42,500

Berdasarkan data-data kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2020 di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. Jumlah tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak **4.368** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak **5.253** kasus, maka mengalami **penurunan** sebanyak **885** kasus (16 %);
- b. Penyelesaian tindak pidana tahun 2020 sebanyak **3.836** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak **4.583** kasus, maka mengalami **penurunan** sebanyak **747** kasus (16 %);
- c. Prosentase Penyelesaian tindak pidana pada tahun 2020 sebesar **87 %**, sedangkan pada tahun 2019 sebesar **87 %** sehingga tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2 tahun;
- d. Laka lantas pada tahun 2020 sebanyak **448 kasus** (MD 214 org, LB 195 org, LR 323 org, Rumat Rp 2,788,600,000), apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak **570 kasus** (MD 190

org, LB 232 org, LR 432 org, Rumat Rp 2,499,350,000), maka mengalami **penurunan** sebanyak **122** kasus (21 %);

e. Pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2020 sebanyak **138,739 gar** (tilang 37.323, teguran 101.416 dan Rumat Rp 5,171,042,500), apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak **281.788 gar** (tilang 96.089, teguran 185.699 dan Rumat Rp 9,938,382,000), maka mengalami **penurunan** sebanyak **143.049** (50 %);

f. Resiko terkena tindak pidana per 100.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar **107 orang**, sedangkan pada tahun 2019 sebesar **128 orang**, maka resiko terkena tindak pidana mengalami **penurunan** sebesar **21 orang**.

g. Selang waktu / crime clock, bahwa pada tahun 2020 rata-rata setiap 2 jam, 60 menit terjadi 1 (satu) tindak pidana & bahwa pada tahun 2019 rata-rata setiap 1 jam, 26 menit terjadi 1 (satu) tindak pidana, sehingga mengalami **perlambatan** waktu 1 jam 34 menit.

5. Data Tindak Pidana (Kriminalitas) di Wilayah Kalimantan Timur

Tahun 2021

a. Data lapor gangguan kamtibmas Satker dan Satwil tahun 2021 sebagai berikut:

N O	BAB XXIVURAIAN	S M D	BP P	KK R	BT G	PS R	BR U	KT M	KB R	PP U	RE SK RI MU M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI MU SUS	JM L
FFF. KEJAHATANKONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	44	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	54
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAP PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
08	PEMALSUAN SURAT	7	4	0	3	0	2	6	2	0	8	0	0	0	32
09	PERJINAHAN	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5
10	PERKOSAAN	0	1	4	0	0	30	6	1	0	0	0	0	0	42
11	PERMAINAN JUDI	9	1	1	3	5	8	17	1	3	12	0	0	0	60
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	6
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	36	34	0	0	0	9	4	10	3	1	0	0	0	97
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	37	15	17	4	5	9	40	14	10	2	0	2	0	155
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	86	123	25	28	18	42	5	7	23	13	0	2	0	372
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	12	14	9	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	41
23	PERAS/ANCAM	4	6	7	4	1	0	4	0	0	5	0	1	0	32
24	PENGGELAPAN	35	17	11	12	3	11	14	8	3	7	0	0	0	121
2	PENIPUAN/PERBUAT	2	3	2	7	4	6	4	2	0	1	0	0	0	10

5	AN CURANG	6	3							7				1	
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	3	1	5	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	15
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5
282	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
285	KEJ.NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	CURANMOR R2	149	69	17	16	47	22	12	2	10	7	0	0	0	351
296	CURANMOR R4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	6
297	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	CURAS SAJAM	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
299	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	4	0	1	4	3	0	1	0	0	0	0	13
301	PENGEROYOKAN	20	15	1	5	7	0	8	4	3	0	0	0	0	63
302	SAJAM	20	10	5	3	1	0	10	1	2	18	0	0	0	70
303	UANG PALSU	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
304	PEMBUNUHAN	4		3	3	8	1	3	2	0	0	0	0	0	24
305	PORNOGRAFI	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6

NO	BAB XX/URAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN ARKOBA	DI T POLAIR	DI TKRIMSUS	JML
306	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

308	POA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	KENAKALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	LA KA KERJA	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	6
317	LA KA LAUT/AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	LA KA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	MIRAS	0	0	14	2	0	0	0	1	0	0	0	1	18
321	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	THDP KEWJBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	THDP A SAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AANDI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	LA KA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	LA KA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	LA KA LANTAS	97	71	89	39	67	25	22	34	52	0	0	0	496
332	LA KA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	LA KA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	7	8	1	25	2	0	2	0	0	5	0	0	50
337	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	CABUL	24	20	1	4	12	0	31	0	0	1	0	0	93
341	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
343	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

344	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	63 1	44 9	22 1	16 2	18 7	18 3	19 6	98	11 0	10 6	0	8	0	23 51
GGG. KEJAHATAN TRANS NASIONAL															
01	NARKOTIKA	2 1 9	1 9 0	2 2 4	5 7	9 3	8 1	25 3	8 6	7 6	0	64	4	0	13 47
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
06	KEJDUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ. TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	22 3	19 1	22 4	57	93	81	25 3	86	76	0	64	4	9	13 61

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI T KR I M S U S	JML
HHH. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA															
01	KORUPSI	1	1	2	1	0	1	1	2	1	0	0	0	7	17
02	ILLEGAL LOGGING	2	0	3	2	0	6	6	3	3	0	0	0	0	25
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7
04	ILLEGAL MINING	1	1	8	0	0	3	0	0	0	0	0	4	4	21
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	BBM ILLEGAL	0	2	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	8
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17
09	ITE	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	11	19
1	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

0															
11	P. KONSUMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	PERTAMBANGAN	0	0	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	9
16	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LA INNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	19
	JUMLAH	9	5	16	7	0	18	12	8	24	0	0	8	40	147
	III. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI														
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WA PRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASIS WA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LA INNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JJJ. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)														
01	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PAKSA														
05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBASAN FISIK LAIN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAAAN THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBANGSAAN,ETNIS,BUDAYA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAAAN OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	SMD	BPP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI T KR I M S U S	JML
12	PELANGGARAN DIM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	17	0	4	2	4	0	3	0	0	2	0	0	0	32
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	18	2	24	3	8	0	3	13	18	7	0	0	0	96
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	35	2	28	5	12	0	6	13	18	9	0	0	0	128
KKK. PELANGGARAN HUKUM NONPIDANA															
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TEMPATHIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LLL. PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MENGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PENGANIYAAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PENGANIYAAAN RINGAN	23	4	22	14	21	0	3	1	2	1	0	0	0	91
1	PENCURIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	RINGAN														
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENGRUSAKAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENA KALAN THDP ORANG ATAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN, MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINATANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG ATAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N O	URAIAN	S M D	B P P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	R E S K R I M U M	D I T N A R K O B A	<i>D I T P O L A I R</i>	D I T K R I M S U S	J M L
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PAWAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHAN NYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEM PERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI														
4 0	TDK DA TANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG- UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG BERBUAT KEJAHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLA MPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CACAT, PINCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	TINDAK PIDANA														
47	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASALUSUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
NO	URAIAN	SM D	B P P	K K R	B T G	P S R	B R U	K T M	K B R	P P U	R E S K R I M U M	D I T N A R K O B A	D I T P O L A I R	D I T K R I M S U S	J M L
56	TTG ORG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	TTG TANAH/TANAMAN/P EKARANGAN	3	2	0	1	0	0	3	0	1	5	0	0	15	
59	JABATAN	12	9	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	26	
60	PELAYARAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	2	16	
	JUMLAH	38	15	23	15	21	0	9	1	3	10	0	13	2	150
	MMM. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
	JUMLAH	0	1	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	8	
	GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	18	1	1	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	39

2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANGLAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	1	1	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	39
NNN. GANGGUAN THDPHEWAN															
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OOO. BENCANA															
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. **Data penyelesaian gangguan kamtibmas Satker / Satwil tahun 2021**

sebagai berikut :

NO	BAB XXVIURAIAN	SMD	BP	KKR	BTG	PSR	BRU	KTM	KBR	PPU	RESKRIMUM	DI TN AR KO BA	DI T POL AIR	DI TK RIM SU S	JML
PPP. KEJAHATANKONVENSIONAL															
01	TTHD KETERTIBAN UMUM	43	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	55
02	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORG/BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN/ BANJIR (PEMBAKARAN)	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
04	KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN/MELETUS/BANJIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	MEMBERI SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PEMALSUAN TTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PEMALSUAN SURAT	4	5	0	3	0	1	3	1	0	6	0	0	0	23
09	PERJINAHAN	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
10	PERKOSAAN	0	0	4	1	0	23	4	1	0	0	0	0	0	33
11	PERMAINAN JUDI	9	1	1	3	5	11	17	1	5	13	0	0	0	66
12	PENGHINAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	PENCULIKAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

14	PERBUATAN YANG TDK. MENYENANGKAN	0	0	2	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	8
15	KEJ. THDP JIWA ORG/PMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGANIAYAAN BERAT	33	22	0	0	0	9	17	6	1	1	0	0	0	89
17	MENGAKIBATKAN ORG MATI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	MENGAKIBATKAN ORANG LUKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PENCURIAN BIASA	35	54	16	4	3	8	35	13	10	1	0	2	0	181
20	PENCURIAN DG PEMBERATAN	83	74	22	28	11	50	2	5	24	8	0	1	0	308
21	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PENCURIAN DGN KEKERASAN	12	12	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	36
23	PERAS/ANCAM	6	5	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	23
24	PENGGELAPAN	33	12	10	16	3	12	15	9	2	3	0	0	0	115
25	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	14	18	2	7	4	6	4	1	0	10	0	0	0	66
26	MENGHANCURKAN / MERUSAK BRG	3	1	4	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	15
27	MENERIMA SUAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PENADAHAN	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	5
218	MEMPEKERJAKAN ANAK DIBWH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	KEKERASAN DLM RMH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	PENYALAHGUNAAN SENPI/HANDAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
221	KEJ. NARKOTIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	KEJ. PSIKOTROPIKA (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	TERORISME (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN (DLM.NEG./LOKAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	PERDAGANGAN MANUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	HKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	KEJ. DUNIA MAYA CYBERCRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	KEJAHATAN PASAR MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	CURANMOR R2	120	17	17	16	16	15	6	0	9	6	0	0	0	222
232	CURANMOR R4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
233	CURAS SENPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	CURAS SAJAM	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
235	OBAT KERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	PEMILIKAN SENPI ILEGAL/HANDAK	0	0	4	0	1	4	2	0	1	0	0	0	0	12
237	PENGEROYOKAN	13	15	1	4	6	0	3	7	3	0	0	0	0	52

238	SAJAM	20	5	5	3	1	0	7	2	2	2	0	0	0	47
239	UANG PALSU	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
240	PEMBUNUHAN	4	1	3	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	17
241	PORNOGRAFI	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
242	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	P O A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	PROD & DAGANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	CURWAT TLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	CURI KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	KENA KALAN RMJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	KARA KONEKSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	LA KA KERJA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
253	LA KA LAUT/AIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	LA KA UDARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ABORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	MIRAS	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
257	THDP NEG SHBT KEPALA SHBT & WKLNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	THDP KEWJBBAN DAN HAK KENEGARAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	THDP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	MERSK, GAR KESOPANAN/KESSL AANDI MK UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	PENCURIAN DLM LINGKUNGAN KELUARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	MERUGIKAN PEMIUTANG/ORG YG BERHAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	PENERBITAN DAN PERCETAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	LA KA LANTAS (TANPA KORBAN MANUSIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	LA KA LANTAS KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	LA KA LANTAS	94	71	85	49	64	20	18	33	51	0	0	0	0	485
268	LA KA LAUT KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	LA KA UDARA KORBAN MATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270	LEDAKAN BOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	PENEMBAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	KEJKONVENSIONAL LAINNYA	6	7	1	24	1	0	7	0	0	3	0	0	49
273	PREMANISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	GULPOK ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	PENISTAAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	CABUL	22	7	1	2	6	0	18	0	0	0	0	0	56
277	TKI ILLEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	TUTUP JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	UNJUK RASA AMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	UNJUK RASA RAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	56	33	20	16	12	17	16	89	10	54	0	6	2003
	QQQ. KEJAHATAN TRANS NASIONAL													
01	NARKOTIKA	22	17	2	5	9	7	11	8	6	0	81	4	1208
02	TERORISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	PEROMPAKAN/PEMBAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	PERDAGANGAN MANUSIA/TRAFFICKING IN PERSON	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05	PENCUCIAN UANG / MONEY LOUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
06	KEJUNIA MAYA / CYBER CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	LUNDUP DAN PERDAGANGAN SENPI / ARM SMUGLING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	KEJ. EKONOMI LINTAS NEGARA / TRANS ECONOMY CRIME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJ TRANS NASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	23	18	22	57	93	70	119	88	66	0	81	4	1217
	RRR. KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA													
01	KORUPSI	1	0	2	0	0	2	2	2	0	0	0	5	14
02	ILLEGAL LOGGING	2	0	3	2	0	7	1	2	3	0	0	1	21
03	ILLEGAL FISHING	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	6
04	ILLEGAL MINING	1	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
05	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
06	UU PANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	BBM ILLEGAL	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	5
08	UU PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
09	ITE	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	15
10	PERBANKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

1 1	P. KONSUMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3	UU PENYIARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	UU KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
1 5	PERTAMBANGAN	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7
1 6	UU AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1 8	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9	HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0	BUDIDAYA TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1	PELWIL PERAIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2	KEJAHATAN THDP. KEKAYAAN NEGARA LA INNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9
	JUMLAH	8	0	16	5	0	18	8	4	13	0	0	3	28
	SSS. KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI													
1	KONFLIK SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SEPARATISME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	THDP. KEAMANAN NEGARA/MAKAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THDP MARTABAT KEDUDUKAN PRES/WAPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI/KONFLIK APARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BENTROK MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMOGOKAN BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UNJUK RASA ANARKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PERKELAHIAN PELAJAR/MAHASISWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0	PERKELAHIAN TANDING SATU LA WAN SATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI LA INNYA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	TTT. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)													
0 1	PELANGGARAN HAM BERAT (GENOCIDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 2	PEMBUNUHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 3	PEMUSNAHAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 4	PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05	PERAMPASAN KEMERDEKAAN/KEBEBASAN FISIK LA IN SECARA SEWENANG-WENANG YG MELANGGAR KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	PENYIKSAAN (SISTEMATIS DAN MELUAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	PERKOSAAN,PERBUDAKAN SEKSUAL,PELACURAN SECARA PAKSA, STERILISASI SECARA PAKSA DLM. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YG SETARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	PENGANIYAA N THDP SUATU KELOMPOK TERTENTU YG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK,RAS,KEBAN GSAAN,ETNIS,BUDA YA,AGAMA,JNS KELAMIN/ALASAN LAIN YG TLH DIAKUI SECARA YUNIVERSAL SBG HAL YG DILARANG MENURU HUKUM INTERNASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KEJAHATAN APARTHEID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TORTURE (PENGANIYAA N OLEH APARAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PELANGGARAN DIM HAL PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA	16	1	4	2	3	1	2	1	2	1	0	0	33
14	PELANGGARAN HAM THDP ANAK	14	0	2	4	5	9	0	3	1	3	1	0	82
15	PELANGGARAN HAM LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	30	1	28	7	12	1	5	14	15	2	0	0	115

NO	BAB XXVIIURAIAN	SM D	BP P	KK R	BT G	PS R	BR U	KT M	KB R	PP U	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
----	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------

UUU. PELANGGARAN HUKUM NONPIDANA															
1	BEJALAN DI ATAS JALAN UMUM ATAU TROTOAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MEMINTA-MINTA DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	BANGUNAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	RUMAH MAKAN/RESTORAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	TEMPATHIBURAN TANPA IJIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	AGRARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PELANGGARAN HUKUM NON PIDANA LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VVV. PELANGGARAN HUKUM PIDANA															
1	MENGGANGGU KETENTRAMAN DGN. MEMBERIKAN TERIAKAN ISYARAT PALSU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	MENGGANGGU RAPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MEMBUAT GADUH PERTEMUAN AGAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	TENTANG MERINTANGI JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MEMBUAT GADUH DI SIDANG PENGADILAN NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	MERUSAK SURAT MAKLUMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	KEALPAAN HINGGA BARANG SITAAN HILANG (RUSAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	KEALPAAN YG. MENIMBULKAN RUSAKNYA MATERAI(SEGEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	PENGANIYAAN THDP BINATANG SENGAJA MEMBUAT SAKIT,CACAT, MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	MEMBAWA HEWAN DGN PAS LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	PENGHINAAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	PENGHINAAN DGN TULISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	KARENA SALAHNYA ORANG MENJADI TERTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	PENGANIYAAN RINGAN	13	3	21	14	13	0	0	1	2	1	0	0	0	68
15	PENCURIAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PENGGELAPAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENIPUAN RINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PENIPUAN THDP PEMBELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PENGRUSAKAN														

9	RINGAN														
20	KARENA SALAHNYA MERUSAK PEKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KENA KALAN THDP ORANG A TAU BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENJAGA ORANG GILA/ANAK-ANAK SEHINGGA MEMBAHAYAKAN ORANG GILA DAN ANAK TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGANGGU KETERTIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	DGN MELAWAN HAK MERINTANGI KEMREDEKAAN BERGERAK DI JALAN UMUM(MERINTANGI KAWANNYA UNTUK DIAJAK MOGOK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PERBUATAN YG DPT MERUGIKAN,MENYUSAHKAN DAN MENDATANGKAN BAHAYA LALIN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TANPA IJIN DARI POLRI MEMASANG PERANGKAP BINA TANG BUAS YANG DPT MEMBAHAYAKAN ORANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TANPA IJIN POLRI MEMBAKAR GEDUNG A TAU RUMAH SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MAMASANG API DI TEPI JALAN UMUM/DEKAT RUMAH YANG DPT MENDATANGKAN BAHAYA KEBAKARAN/KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MENJUAL, MENAWARKAN MAKANAN ATAU MINUMAN YANG SUDAH RUSAK SEHINGGA DPT MERUSAK KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MEMBUAT RIUH/INGAR PADA WAKTU MALAM MEMBUAT TIDUR TERGANGGU, MEMBUAT RIUH WAKTU ADA IBADAH/SEDANG PENGADILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MINTA-MINTA DI TEMPAT UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GELANDANGAN / TDK MEMPUNYAI MATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PENCAHARIAN MENGEMBARA KE MANA-MANA														
3 3	TDK BERHAK MEMAKAI GELAR BANGSAWAN BINTANG ATAU TANDA KEHORMATAN NEGERA RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 4	DI TEMPAT UMUM TIDAK BERHAK MEMAKAI PAKAIAN PEGAWAI NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 5	TANPA IJIN POLRI (PEGAWAI NEGERI YG BERHAK), MENGADAKAN PESTA UMUM DAN PA WAI DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 6	TDK MENURUT PERINTAH PETUNJUK POLRI PADA WAKTU ADA PESTA/ARAK-ARAKAN DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 7	SEBAGAI MATA PENCAHARIAN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER GIGI DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IJIN DAN DALAM KEADAAN YANG TIDAK MEMAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 8	LALAI TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA KEPALA DESA ATAS KEPINDAHAN NYA. LALAI MEMBERITAHU KPD KEPALA DESA STLH 14 HARI TINGGAL DI DAERAH TSB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 9	LOSMEN, HOTEL PENGINAPAN YG PEMILIKNYA : (A) TDK MENGADAKAN BUKU TAMU (B) LALAI TDK MELAPORKAN/MEM PERLIHATKAN BUKU TAMU KEPADA POLRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 0	TDK DA TANG SETELAH DIPANGGIL MENURUT UNDANG-UNDANG, UTK MENJADI SAKSI, AHLI / JURU BAHASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN YG DIMINTA KUASA HUKUM (CQ.POLRI) THDP BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM/BARANG / ORG SEDANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	BERBUAT KEJAHATAN														
4 2	TDK MEMBERIKAN PERTOLONGAN THDP ORANG DI DLM KEADAAN BAHAYA MAUT, SEDANGKAN PERTOLONGAN TERSEBUT TDK MEMBAHAYAKAN DIRINYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 3	DIMUKA UMUM : MENYANYIKAN LAGU-LAGU, PIDATO, MENGADAKAN GAMBAR/TULISAN YG MELANGGAR KESOPANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4	NYATA MABUK/KENTARA MABUK DI JALAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	MEMAKAI BINA TANG UNTUK PEKERJAAN YG TERLAMPAU BERAT, MEMAKAI BINA TANG YG CA CAT, P INCANG, LUKA, HAMIL UTK PEKERJAAN SESUATU DGN KEADAANNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 6	MENJUAL, MENAWARKAN, MEMBAGIKAN, MENYERAHKAN BENDA JIMAT/PENANGKAL DENGAN DALIH BENDA TRSB ADA KESAKTIANNYA. MENGAJARKAN ILMU/KEPANDAIAN SHG MENIMBULKAN KEPERCAYAAN TERHINDAR DARI BAHAYA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 7	MEMBIARKAN TERNAKNYA YG BERSAYAP BERJALAN DI TANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI DENGAN MELAWAN HAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 8	DGN TIADA BERHAK MEMBIARKAN TERNAKNYA BERJALAN DITANAH YG SUDAH DITABURI/DITANAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 9	MENINGGALKAN ORANG YG PERLU DITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 0	MEMBUKA RAHASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1	PELAYARAN DAN PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52	TTG KAM UMUM BG ORG.BRG DAN KES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TTG KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	TTG PENGUASA UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	TTG ASAL USUL DAN PERKAWINAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
56	TTG ORG YG PERLUDITOLONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	TTG KESUSILAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	TTG TANAH/TANAMAN/P EKARANGAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	6
59	JABATAN	9	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	19
60	PELAYARAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	23	11	22	14	13	0	1	1	3	7	0	0	95

N O	BAB XXVIIIURAIAN	S M D	BP	KK R	BT G	PS R	BR U	KT M	KB R	PP U	RE SK RI M U M	DI TN AR KO BA	DI T PO L AI R	DI TK RI M SU S	JM L
	WWW. GANGGUAN THDP. ORANG														
1	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2	BUNUH DIRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	TEMU BAYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEMBUNYIKAN AUDIO BERLEBIHAN/KERAS / BISING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	GANGGUAN THDP ORANG LAINNYA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	6
	XXX. GANGGUAN THDP. BARANG														
1	KEBAKARAN	18	0	1	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	36
2	KEHILANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GANGGUAN THDP BARANG LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	18	0	1	0	13	0	4	0	0	0	0	0	0	36
	YYY. GANGGUAN THDPHEWAN														
1	MEMBUNUH HEWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZZZ. BENCANA														
1	TANAH LONGSOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ANGIN PUTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- c. Rekapitulasi gangguan kamtibmas dan penyelesaian berdasarkan penggolongan jenis kejahatan sebagai berikut :

N O	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1.	KEJAHATAN KONVENSIONAL	2769	2417	87 %	2676	2255	84 %	T 93 (3.3 %)
2	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	1430	1280	89 %	1361	1217	89 %	T 69 (4.8 %)
3.	KEJ. KEKAYAAN NEGARA	169	139	82 %	147	103	70 %	T 22 (13 %)
4.	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	0	0	0	0	2	-	-
J U M L A H		4.368	3.836	87 %	4.184	3.577	85 %	T 184 (4.21 %)

- d. Gangguan kamtibmas dan penyelesaian persatwil sebagai berikut :

N O	KESATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	DITRESNA RKOBA	234	169	72 %	64	81	126 %	T 170 (72 %)
2	DITRESKRIMUM	122	109	89 %	125	63	50 %	N 3 (2.4 %)
3	DIT POLAIR	45	26	57 %	33	13	39 %	T 12 (26 %)
4	DITRESKRIMSUS	61	46	75 %	51	32	62 %	T 10 (16 %)
J U M L A H		462	350	75 %	273	189	69 %	T 189 (40 %)

1	RESTA SMDA	911	886	97 %	954	875	91 %	N 43 (4.7 %)
2	RES BPP	791	727	91 %	664	524	78 %	T 127 (16 %)
3	RES KUKAR	460	458	99 %	514	501	97 %	N 54 (11.7 %)
4	RES BERAU	379	281	74 %	282	269	95 %	T 97 (25.5 %)
5	RES KUTIM	368	289	78 %	483	304	62 %	N 115 (31.25 %)
6	RES PASER	304	264	86 %	331	262	79 %	N 27 (8.8 %)
7	RES BTG	291	229	78 %	246	251	102 %	T 45 (15.4 %)
8	RES KUBAR	211	191	90 %	206	196	95 %	T 5 (2.3 %)
9	RES PPU	191	161	84 %	231	206	89 %	N 40 (20 %)
JUMLAH		3.906	3.486	89 %	3.911	3.388	86 %	N 5 (0.12 %)
TOTAL KESELURUHAN		4.368	3.836	87 %	4.184	3.577	85 %	T 184 (4.21 %)

e. **5 Kasus tertinggi tahun 2021**

NO	KASUS	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TREND
		L	S	% SELRA	L	S	% SELRA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NARKOBA	1419	1275	89 %	1347	1208	89 %	T 72 (5 %)
2	CURANMOR	274	234	85 %	357	223	62 %	N 83 (30 %)
3	CURAT	382	348	91 %	372	308	82 %	T 10

								(2.6 %)
4	ANIRAT	132	102	77 %	97	89	91 %	T 35 (26 %)
5	CURAS	48	36	75 %	41	36	87 %	T 7 (14 %)
JUMLAH		2.255	1995	88 %	2.214	1.864	84 %	T 41 (1.8 %)

f. Rekapitulasi laka Lantas Persatwil sebagai berikut:

NO	SAT WIL	TAHUN 2020						TAHUN 2021					
		JML LAKA	SE LE SAI	KORBAN			RUMAT	JML LAKA	SE LE SAI	KORBAN			RUMAT
				M D	L B	L R				M D	L B	L R	
1	SAMAR INDA	96	11 4	4 7	36	64	Rp 247,500, 000	97	94	77	13	39	Rp 675.600.0 00
2	BALIKP APAN	47	56	3 7	5	26	Rp 170,000, 000	71	71	46	11	37	Rp 125.000.0 00
3	KUKAR	77	86	4	57	73	Rp 512,900, 000	89	85	26	55	59	Rp 1.028.400. 000
4	BERAU	55	34	3 3	15	35	Rp 276,300, 000	25	20	16	6	16	Rp 83.000.00 0
5	PASER	41	31	3 1	4	31	Rp 71,800,0 00	67	64	19	13	62	Rp 208.400.0 00
6	BONTA NG	56	39	2 0	39	33	Rp 663,700, 000	39	49	15	14	31	Rp 364.250.0 00
7	KUBAR	22	20	1 3	5	20	Rp 93,000,0 00	34	33	20	5	29	Rp 206.100.0 00
8	PPU	31	29	2 0	12	13	Rp 152,000, 000	52	51	35	15	22	Rp 291.500.0 00
9	KUTIM	23	22	9	22	28	Rp 601,400, 000	22	18	13	10	12	Rp 403.200.0 00
JML		44 8	43 1	2 1 4	1 9 5	32 3	Rp 2,788,6 00,000	49 6	48 5	2 6 7	14 2	3 0 7	Rp 3.385.45 0.000

g. Rekapitulasi Pelanggaran Lalu Lintas Persatwil sebagai berikut:

NO	SATWIL	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA	TILAN G	TEGURAN	JML	DENDA
1	PJR DITLANTAS	2,69 2	3,581	6,27 3	Rp 470,400,00 0	887	1.835	2.722	Rp 158.975.0 00
2	SAMARINDA	12,7 55	17,075	29,8 30	Rp 2,270,700, 000	3.230	6.144	9.374	Rp 451.240.0 00
3	KUKAR	4,21 8	11,020	15,2 38	Rp 571,800,00 0	405	5.756	6.161	Rp 45.950.00 0
4	KUTIM	2,35 7	9,816	12,1 73	Rp 396,126,00 0	1.379	5.374	6.753	Rp 208.923.0 00
5	BALIKPAPAN	7,23 4	8,649	15,8 83	Rp 800,062,50 0	3.531	3.489	7.020	Rp 646.625.0 00
6	BONTANG	1,60 1	12,251	13,8 52	Rp 52,424,000	250	7.662	7.912	Rp 52.350.00 0
7	BERAU	2,68 0	12,743	15,4 23	Rp 307,264,00 0	664	5.822	6.486	Rp 1.383.963. 000
8	PASER	766	11,817	12,5 83	Rp 131,450,00 0	256	2.768	3.024	Rp 47.690.00 0
9	PPU	1,78 2	8,429	10,2 11	Rp 24,300,000	205	2.992	3.197	Rp 15.850.00 0
10	KUBAR	1,23 8	6,035	7,27 3	Rp 146,516,00 0	1.055	2.754	3.809	Rp 102.520.0 00
JUMLAH		37,3 23	101,4 16	138, 739	Rp 5,171,04 2,500	11.8 62	44.59 6	56.4 58	Rp 3.114.08 6.000

Berdasarkan data-data kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2021, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Jumlah tindak pidana pada tahun 2021 sebanyak **4.184** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak **4.368** kasus, maka mengalami **penurunan** sebanyak **184** kasus (4.21 %);
2. Penyelesaian tindak pidana tahun 2021 sebanyak **3.577** kasus, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak **3.836** kasus, maka mengalami **penurunan** sebanyak **259** kasus (6.7 %);
3. Prosentase Penyelesaian tindak pidana pada tahun 2021 sebesar **85%**, sedangkan pada tahun 2020 sebesar **87%** , maka mengalami **penurunan** sebanyak 2 %;
4. Laka lantas pada tahun 2021 sebanyak **496 kasus** (MD 267 org, LB 142 org, LR 307 org, Rumat Rp 3.385.450.000), apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak **448 kasus** (MD 214 org, LB 195 org, LR 323 org, Rumat Rp 2,788,600,000), maka mengalami **kenaikan** sebanyak **48** kasus (10.7 %);
5. Pelanggaran Lalu Lintas pada tahun 2021 sebanyak **56.458 gar** (tilang 11.862, teguran 44.596 dan Rumat Rp 3.114.086.000), apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak **138.739 gar** (tilang 37.323, teguran 101.416 dan Rumat Rp

5.171.042.500), maka mengalami **penurunan** sebanyak **82.281** (59.3 %);

6. Resiko terkena tindak pidana per 100.000 penduduk pada tahun 2021 sebesar **102 orang**, sedangkan pada tahun 2020 sebesar **107 orang**, maka resiko terkena tindak pidana mengalami **penurunan** sebesar **5 orang**.

7. Selang waktu / crime clock, bahwa pada tahun 2021 rata-rata setiap 2 jam, 54 menit terjadi 1 (satu) tindak pidana & bahwa pada tahun 2020 rata-rata setiap 2 jam, 60 menit terjadi 1 (satu) tindak pidana, sehingga mengalami **perlambatan** waktu sebanyak 6 menit.

B. Potensi Tingkat Kriminalitas Terhadap Adanya Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti faktor ekonomi, lingkungan, keluarga maupun faktor kepribadian individu. Kriminalitas seringkali juga ditengarai sebagai akibat buruk pembangunan yang tidak merata, timpang dan terjadi baik di kota maupun desa. Kriminalitas yang terjadi dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak mengenal usia, profesi, status sosial, maupun gender. Setiap orang dapat berpotensi melakukan protensi.

Kejahatan menurut Bemmelen merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kegelisahan. Kriminalitas atau tindak kejahatan menurut ahli kriminologi merupakan suatu perbuatan sengaja yang melanggar hukum, dilakukan bukan untuk pembelaan diri atau pembenaran dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*). Kejahatan dapat berbentuk ucapan atau perbuatan yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila serta menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).

Era perkembangan globalisasi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini, mengakibatkan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga semakin cepat terjadi. Gaya hidup masyarakat pun juga cenderung ikut berubah, misalnya saja masyarakat lebih ke materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Tentu tidak hanya perubahan gaya hidup, tetapi perubahan perilaku masyarakat pun dapat terjadi, ada yang berubah ke arah positif dan ada pula perilaku yang berubah ke arah negatif. Perilaku yang berubah ke arah negatif inilah yang cenderung dapat mengakibatkan potensi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan tentu menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap rasa aman tengah-tengah di kehidupan masyarakat, mengingat rasa aman itu sendiri sangatlah mahal harganya, dalam artian rasa aman itu tentu tidak dapat dinominalkan dengan materi, karena berkaitan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena dengan rasa aman kita sebagai masyarakat dapat melakukan segala aktivitas kita dengan penuh kedamaian, akan berbeda kalau kita merasa takut setiap harinya dan tidak merasa aman, sudah dipastikan kita tidak dapat melakukan aktivitas kita dengan tenang.

Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dapat meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), serta faktor kesejahteraan. Adapun faktor eksternal dapat berupa faktor pendidikan, faktor pergaulan atau faktor lingkungan.

Begitupun halnya dengan pemindahan IKN di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, tentu tidak bisa ditampikkan bahwa dengan hadirnya IKN di wilayah Sepaku nantinya bukan tidak mungkin potensi-potensi kriminalitas dapat bermunculan. Hal ini disampaikan langsung ketika Penulis melakukan wawancara langsung dengan Kapolsek Sepaku, Bapak Kasiyono, S.H,

pada tanggal 4 Oktober 2022, beliau menyampaikan bahwa Sepaku saat ini tengah menjadi sorotan orang banyak. Hadinya IKN di Sepaku, yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) desa, membawa angin segar serta dampak positif bagi perekonomian warga saat ini. Hal demikian dikarenakan, warung makanan semakin laris, kontrakan-kontrakan warga semakin laku, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tentu dampak negatifnya juga pasti ada, seperti halnya semua serba mahal, misalnya lahan tanah. Hal ini nantinya dapat memicu konflik antar warga terkait dengan sengketa lahan, yang nanti akan berpotensi menimbulkan kriminalitas antar warga. Konflik lahan dipicu, misalnya masyarakat transmigran yang terkait dengan penggarapan lahan. Terkait dengan kriminalitas lain, seperti peredaran narkoba. Sampai dengan bulan 11 Oktober 2022 ini sudah terdapat 12 (dua belas) kasus, baik itu pemakai maupun pengedar. Potensi tingkat kriminalitas khususnya narkoba ini dapat dikatakan sangat berpotensi meningkat, karena daerah Sepaku bisa saja menjadi pusat peredaran barang haram tersebut, ditambah dengan banyaknya pekerja yang nanti akan masuk ke wilayah IKN ini. Hal ini juga masih menjadi pertanyaan apakah peningkatan tersebut dipengaruhi karena hadirnya IKN ini atau karena faktor pemerintahan yang tinggi. Adapun bentuk kriminalitas-kriminalitas lain belum terlalu tampak, tetapi tentu juga tetap butuh

pengawasan, karena Kecamatan Sepaku sudah mulai ramai didatangi orang-orang dari luar.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasatreksrim Polres Penajam Paser Utara, Bapak Dian Kusnawan, S.H., M.H, kepada Penulis pada tanggal 5 Oktober 2022, beliau mengatakan bahwasannya Polres Penajam Paser Utara membawahi Polsek Penajam, Polsek Waru, Polsek Babulu, dan Polsek Sepaku. Berkaitan dengan daerah di Penajam Paser Utara, kalau untuk potensi pasti ada, karena dalam proses pembangunan menghadirkan jumlah orang yang sangat banyak, baik itu pekerja atau karyawan. Namun hal demikian, sudah terdapat tim untuk mengawasi pembangunan tersebut. Para pekerja tidak tinggal di lingkungan di masyarakat, jadi sudah disiapkan apartement khusus pekerja, sehingga tingkat kerawanan kriminalitas dapat diminimalisir. Untuk tahun 2022, Januari-Oktober 2022, yang awalnya 13 (tiga belas) kasus ditambah 1 (satu) menjadi 14 (empat belas) kasus. Adapun kasus yang paling tinggi pencurian dengan pemberatan ada 14 (empat belas) kasus, selesai 13 (tiga belas) kasus. Pencurian biasa ada 13 (tiga belas) kasus. Disusul dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Perkara lainnya perkebunan, pencurian buah sawit ada 7 (tujuh) kasus, ada perjudian 6 (enam) kasus, dan 6 selesai, penganiayaan 6 (enam) kasus selesai. Kalau untuk pidana satu tahun belakangan ini 2022, 1 (satu) tahun 87 (delapan puluh tujuh)

perkara, selesai 84 (delapan puluh empat), tahun 2021 terdapat 106 (seratus enam) perkara, selesai 91 (sembilan puluh satu). Tahun 2022, terdapat 100 (seratus) perkara, selesai 86 (delapan puluh enam) perkara, khusus untuk kriminal umum. Adapun sampai saat ini belum ada terkait laporan mafia tanah, karena biasanya berkelompok dan terorganisir.

Penulis juga melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 5 Oktober 2022 yang pada tanggal tersebut diwakili oleh Amdan Fauzan, S.H., selaku juru bicara Pengadilan Negeri Penajam. Beliau mengatakan bahwa banyak hal yang dapat dikaji dari aspek setelah ditetapkannya undang-undang IKN, termasuk dari sisi kriminalitasnya. Adapun secara historis sebenarnya Pengadilan Negeri Penajam baru beroperasi sejak tahun 2018, jadi masih tergolong baru, sehingga kasus-kasus yang masuk pun dapat dikatakan masih sedikit dibandingkan di pengadilan-pengadilan di wilayah lainnya. Namun, dari semua semua perkara tetap yang paling banyak narkoba, karena dapat dipengaruhi akses masuk dari banyak orang. Apalagi adanya pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Paser, khususnya di kecamatan Sepaku. Selain narkoba sebenarnya juga yang berpotensi adalah tindakan-tindakan penyerobotan ilegal, kemudian mafia-mafia tanah, yang dulu tanah tersebut tidak ada yang menggarap, namun tiba-tiba ada yang mengklaim.

Demikian juga disampaikan oleh Bapak Adiansyah, S.H., M.H, Kejaksaan Negeri Balikpapan, pada tanggal 4 Oktober 2022, bahwasannya untuk saat ini perkembangan setiap bulannya perkara untuk sementara kami menilai dampak kriminalitas terhadap IKN belum ada, karena diketahui muara IKN ini pembangunan ibu kota. Namun, untuk saat ini belum terdapat peningkatan secara signifikan. Kalau potensi mungkin ada, karena kedatangan penduduk bisa menjadi potensi munculnya tingkat kriminalitas. Terkait misalnya dengan klaim lahan dan sebagainya. Adapun yang dirasakan masyarakat tingkat hunian semakin meningkat, mempunyai dampak ekonomi sangat besar, baik itu makanan, rental mobil, pendapatan masyarakat Balikpapan. Peningkatan ekonomi mengalami kenaikan, dampak positifnya sangat bagus dan berdampak secara signifikan. Disisi lainnya karena komunitas semakin heterogen, adanya saling beririsan kebutuhan, sehingga potensi kriminalitas pasti ada, misalnya rental mobil ada yang tidak bayar, maka dapat menimbulkan kriminalitas. Seiring dengan perkembangan ekonomi, maka dapat juga semakin meningkatkan potensi kriminalitas, tentu tidak ditampikkan pasti ada potensi terkait dengan adanya peningkatan kriminalitas. Untuk 5 (lima) tahun terakhir, 60% kasus narkoba, penipuan dan penggelapan, disusul pencurian, dan kejahatan-kejahatan konvensional lainnya. Pintu masuknya dari daerah perbatasan, antara Kalimantan Timur

dan Malaysia, karena aksesnya dapat melewati laut untuk mengedarkan narkoba.

B. Kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi potensi berkembangnya kriminalitas di wilayah Ibu Kota Negara (IKN)

Negara hukum dan penegakan hukum merupakan rangkaian kesatuan yang tidak bisa terlepas. Untuk bisa melaksanakan suatu penegakan hukum yang baik maka harus ada actor pelaksananya dan untuk itu diperlukanlah aparat penegak hukum.

Jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa secara keseluruhan(Syamsuddin, 2008)

Menurut Samuel P.Huntington, keadaan penegakan hukum di Negara kita saat ini sedang dalam mode *transplacement* , yang ditandai dengan Tarik ulur antara para pemikir baru dengan pemikir lama atau mereka yang ingin perubahan dengan mereka yang merupakan bagian dari orde status quo. Hal tersebut secara nyata akan mempengaruhi proses penegakan hukum di Negara kita.(Syamsuddin, 2008)

Untuk itu harus diupayakan agar masyarakat di Negara kita menjadi masyarakat yang *hyper regulated* yaitu terlalu banyak aturan hukum namun minim dari segi penegakan hukumnya sehingga akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat itu sendiri serta tidak memberikan rasa keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Suatu penegakan hukum yang baik haruslah merupakan penegakan hukum yang tidak tebang pilih atau bersifat subyektif atau pilih kasih. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum harus dilakukan tindakan terhadapnya berupa proses hukum sesuai aturan yang ada. Sehingga keberadaan azas *Equality before the law* benar-benar terlaksana sesuai dengan maknanya sendiri.

Aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum tersebut dan untuk bisa melaksanakan asas tersebut dan untuk itu aparat penegak hukum harus menjadikan aturan hukum sebagai sandarannya dan menjadikannya sebagai panglima dalam pelaksanaan penegakan hukum dan tidak menjadikan aturan hukum sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagaimana pendapat yang disampaikan John Locke bahwa a state of peace, a good will, mutual assistance and preservation. Dan bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah adalah baik. (Boy Nurdin, 2012)

Perubahan yang baik tidak sekedar perubahan, tetapi selalu mengandung makna pembaharuan atau memperbaiki sebagai suatu proses dinamika kehidupan atau bertalian dengan kehidupan. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma, tata kerja dan sebagainya. (Boy Nurdin, 2012)

Dan walau terjadi pembaruan melalui perubahan di dalam suatu Negara, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus tetap berpegang pada tujuan hukum yaitu membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) dan juga mensejahterakan masyarakat (*human welfare*)

Salah satu perubahan yang terjadi di Negara Indonesia saat ini adalah adanya wacana pembentukan ibu kota negara baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) tersebut merupakan perubahan yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum di wilayah sekitar.

Masuknya orang-orang ke sekitar wilayah IKN pasti akan mempunyai potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Walaupun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, potensi kriminalitas tersebut belumlah nampak secara signifikan.

Namun dengan pembangunan yang sudah mulai dilaksanakan, orang-orang dari luar Provinsi Kalimantan Timur yang didatangkan untuk menjadi pekerja dari berbagai bangunan yang ada di wilayah IKN, harus diperlukan kesiapan dari aparat penegak hukum untuk bisa terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik.

Penulis telah melakukan penelitian ke beberapa instansi penegak hukum di beberapa wilayah sekitar IKN antara lain Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melihat kesiapan dari instansi

1. Kesiapan Kepolisian

Keberadaan wacana pembangunan ikn pastinya akan menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negative terutama dengan banyaknya orang-orang dari luar Kalimantan Timur yang masuk ke dalam kawasan sekitar ikn baik untuk bekerja terkait pembangunan ikn maupun untuk tinggal di wilayah tersebut.

Positifnya adalah adanya berkah untuk warga misal banyak dibukanya rumah-rumah kontrakan dari warga di sini untuk para

pendatang, banyak rumah yang dulu kosong sekarang sudah ditempati, banyak pembangunan.

Negatifnya dari segi kamtibmas cukup terasa. Dengan adanya ikn, semua hal menjadi mahal terutama tanah dan pihak kepolisian mendorong kelurahan dan masyarakat dan desa untuk lebih pro aktif dalam rangka menjembatani terkait persoalan tanah tersebut. Dan pihak kepolisian sudah cukup sering melakukan mediasi terkait pengukuran tanah tersebut agar tidak terjadi konflik lahan yang lebih jauh.

Bicara tentang kriminal pasti sebanding dengan pembukaan kota baru, wilayah baru.

Saat ini kepolisian sendiri sedang mengawal terkait situasi dan kondisi kamtibmas dari wilayah ikn tersebut.

Kesiapan polsek sepaku terkait keberadaan pembangunan ikn antara lain:

a. penambahan personel di terutama di polsek.

Biasanya polsek non urban paling banyak berisi 20-25 sedangkan di polsek terutama di polsek Sepaku ditambah menjadi 56 bahkan masih akan terus bertambah dengan 15 desa di wilayah polsek sepaku.

b. Pejabat yang ada di polsek sepaku sudah perwira semua.

c. Pengembangan sumber daya manusia dari para personelnnya.

Dalam hal ini terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas dari para personel kepolisian yang ada.

- d. Ditambahnya fasilitas baik kendaraan maupun bangunan yang ada terutama barak untuk tempat tinggal personel kepolisian kami.
- e. Kapolda sendiri fokus pada pengaman terkait pembangunan ikn terutama di wilayah-wilayah sekitar rencana pembangunan ikn tersebut.

2. Kesiapan Kejaksaan

Banyak event nasional sekarang banyak dilakukan di Balikpapan sejalan dengan berkembangnya wacana pembentukan ikn.

Terkait pembentukan ikn, dari pihak kejaksaan berada pada Deputi hukum ada di pembangunan ikn, untuk pengamanan dan pendampingan hukum serta pendampingan pelaksanaan pembangunan secara strategis.

3. Kesiapan Pengadilan

Pihak pengadilan sudah mempersiapkan diri terkait potensi kriminalitas terutama perkara narkoba karena semakin banyak orang yang masuk dan juga penyerobotan tanah secara illegal, mafia tanah karena erat kaitannya dengan keberadaan wacana pembentukan ikn dan gugatan keperdataannya sudah mulai banyak yang masuk.

Selain itu pengadilan juga berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan karena merupakan kesatuan dalam *criminal justice system* atau system peradilan pidana di Indonesia.

Terkait kesiapan pengadilan sendiri dalam pembentukan ikn, maka ada beberapa hal yang dilakukan:

- a. Layanan untuk peradilan/supporting access to justicesystem :
Membangun dan memperluas bangunan pengadilan sehingga menjadi lebih representative sehingga didesain untuk bangunan kelas IA khusus karena berada di kawasan khusus IKN.
- b. Keterlibatan dalam forum terutama forum pemerintah daerah dengan beberapa instansi lainnya, persiapan menyongsong ikn. Beberapa kebijakan dari pimpinan sering diminta advice atau legal opini terkait dengan lokasi ikn tersebut
- c. Secara teknik pengadilan memang tidak terlibat langsung dan hanya sebatas mengawal untuk koordinasinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan dua hal, yakni:

1. Terdapat potensi tingkat kriminalitas dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur, terutama terkait dengan tindak pidana narkoba. Mengingat 4 (empat tahun) terakhir ini kasus tertinggi di wilayah Kalimantan Timur adalah tindak pidana narkoba. Dengan demikian, dengan adanya pemindahan IKN ini ditambah banyaknya orang-orang yang berdatangan ke wilayah IKN akan semakin membuka peluang terhadap potensi-potensi kriminalitas.
2. Aparat penegak hukum dalam menghadapi potensi berkembangnya kriminalitas yang berada wilayah Ibu Kota Negara saat ini sudah cukup siap untuk menghadapi dampaknya. upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan/langkah preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta penambahan personil di beberapa sektor.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan Penulis dalam hal ini adalah hendaknya untuk menyongsong masa perpindahan IKN ini, kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan penanggulangan tindak pidana (kriminalitas) harus di design sedemikian rupa, serta harus terintegrasi dengan kebijakan-kebijakan sosial lainnya. Selain itu, Penulis berharap bahwa penelitian ini tidak hanya sampai disini aja, melainkan perlu lagi dilakukan penelitian untuk 5 tahun kedepannya terkait dengan tingkat kriminalitas di wilayah IKN ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, 2015, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

BAB III Metode Penelitian https://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf diakses 04 Desember 2022

BAB II Metode Penelitian ,
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/645/6/131803027_file%206.pdf ,
diakses 04 Desember 2022

Boy Nurdin, M. S. (2012). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. PT.Alumni.

Romli Atmasasmita, 2010, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Abu

Achmadi dan Cholid Narbuko, 2015, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Romli Atmasasmita, 2010, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aidtama.

Kartono, Ferry Anka Sugandar, dan Abdul Azis, Peranan Polres Tangerang Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, *Pamulang Law Review* Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 59–74.

Kartono Kartini, 1999, *Kamus Lengkap Psikologis*, Jakarta: Rajawali Pers.

Maulida Rachmalia Dewi, Elin Diyah Syafitri, Ajeng Nugrahaning Dewanti, *Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia*, Vol. 16, No. 4, 2020, 300-313.

Rafida Khairani dan Yeni Ariesa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi), *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 99–110.

Reni Ria Armayani Hasibuan, *Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V No. 1.

———, Pengaruh Kriminalitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 166–178.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Soedjono D, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan Dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara.

Soekanto, Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin, A. (2008). *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara*. PT. Kompas Media Nusantara.

Lampiran

Surat permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5604 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara
di Penajam Paser Utara

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5.	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5685 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kepolisian Sektor Penajam
di Penajam

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindehan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5.	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Muhendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5688 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kepolisian Sektor Sepaku
di Sepaku

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H, M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003
FAKULTAS HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5690 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
di- Balikpapan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H, M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NID. 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5692/UN17.8/UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
di- Balikpapan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H, M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5.	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.
NIP: 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5693 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara
di Penajam Paser Utara

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5.	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5691 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan
di- Balikpapan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemandangan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H, M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5.	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
NIP. 198203072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 566 /UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara
di Penajam Paser Utara

Schubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H, M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.
NIP. 198205072003121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 5689/UN17.8/ UN17.8/PT.00.04/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan
di- Balikpapan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul "Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Potensi Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kalimantan Timur", bersama ini dimohon kiranya Bapak dapat mengizinkan dosen kami melakukan penelitian. Adapun nama-nama peneliti kami, sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Rini Apriyani, S.H., M.H.	Dosen FH Unmul
2.	Nur Aripkah, S.H, M.H.	Dosen FH Unmul
3.	Ismianingsih	Mahasiswa FH Unmul
4.	Dea Nanda Selvia Isran	Mahasiswa FH Unmul
5.	Andika Iqbal Inanda Rizal	Mahasiswa FH Unmul

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

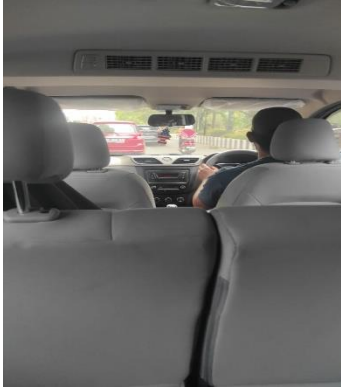
Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.
NIP. 198263072003121003

Dokumentasi Lapangan

1. Berangkat ke Balikpapan



2. Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, S.H. di Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan



3. Wawancara dengan Bapak Kasiyono, S.H. di Kepolisian Sektor Sepaku



4. Wawancara dengan Bapak Dodik Iryanto, S.H. di Kepolisian Sektor Penajam Paser Utara



5. Wawancara dengan Kasub Bagian Intel di Kepolisian Resor Balikpapan



6. Wawancara dengan Bapak Dian Kusnawan, S.H. di Kepolisian Resor Penajam Paser Utara



7. Wawancara dengan Bapak Amdian Fauzan di Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara



8. Wawancara dengan Bapak Imam Cahyono, S.H. di Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara



9. Ibu Kota Negara

